

**Bersama Sahabat
UMi Bangkit**



Annual Report 2021



“

Pandemi ini menguatkan komitmen kami untuk membantu pelaku usaha Ultra Mikro atau UMi agar tidak sekadar sanggup bertahan, namun berusaha bangkit dan terus berkembang.”

Ririn Kadariyah



Daftar Isi

Pengantar Laporan Tahunan 2021

	Di mana Kami Hadir	12
	Apa yang Telah Kami Lakukan	14
	Kaleidoskop	16
	Dampak Positif dan Kinerja PIP	24
	Dampak Pembiayaan UMi pada UMKM Indonesia	30
	Kinerja Keuangan PIP	32
	5 Tahun Berkarya untuk Indonesia	34
	Mitra Kami	36

Ikhtisar

	Apa itu Pembiayaan UMi?	42
	Profil Penyaluran Pembiayaan UMi	46

Pembiayaan UMi

	Sistem Pengendalian Risiko Bisnis	62
	BLU <i>Maturity Rating</i>	64
	Anti-korupsi	66

Tata Kelola

	Laporan Dewan Pengawas	70
	Laporan Direksi	76

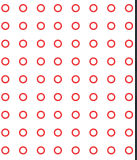
Laporan Manajemen

	Informasi Umum & Identitas PIP	84
	Profil Dewan Pengawas	90
	Profil Direksi	96

Profil PIP

	Laporan Realisasi Anggaran	106
	Laporan Operasional	108
	Neraca	110
	Laporan Arus Kas	112

Laporan Keuangan



Pengantar Laporan Tahunan 2021

Selamat datang kembali di beranda Laporan Tahunan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pada tahun 2021 ini, “Bersama Sahabat – UMi Bangkit” menjadi tema besar yang menjadi penyemangat kami berkarya untuk negeri tercinta. Tema ini berkesinambungan, melanjutkan tema tahun sebelumnya: “Berkarya di Tengah Pandemi”.

Setelah berhasil melalui turbulensi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Indonesia mencoba bangkit untuk memulihkan ekonomi. Pandemi ini menguatkan komitmen kami untuk membantu pelaku usaha Ultra Mikro atau UMi agar tidak sekadar sanggup bertahan, namun berusaha bangkit dan terus berkembang.

Kami sangat menyadari, kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) – termasuk UMi – sangat besar pada perekonomian nasional. Sektor UMKM – dengan jumlah 64,2 juta pelaku – menyumbang 61,07 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Tidak hanya itu, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan sekitar 60 persen dari total investasi di Indonesia.

Demi mewujudkan misi mendukung UMi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kami melakukan perbaikan internal dan sejumlah inovasi. Misalnya, Program Inkubasi UMi yang kami lakukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Melalui program ini, debitur juga diberikan pelatihan dan pendampingan yang bisa meningkatkan kinerja usahanya. Niscaya, dampak positif yang kami berikan bagi UMi ini, tercermin pula pada kinerja kami pada tahun 2021.

Kami tidak dapat mengingkari bahwa para pihak terkait, baik mitra penyalur pembiayaan maupun mitra program, memainkan peran sentral dalam upaya mendampingi dan mendorong mitra pelaku usaha ultra mikro (UMi) untuk bangkit dengan semangat baru. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Catatan ini tentu tidak lengkap tanpa ucapan terima kasih kami kepada pihak yang sejak awal memberi kepercayaan kepada kami, khususnya kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dewan Pengawas PIP, Direktur Sistem Manajemen Investasi selaku pembina teknis, dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku pembina keuangan PIP.

Akhir kata, dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, kami mengundang para pembaca untuk melangkah lebih jauh dari beranda, masuk ke dalam galeri Laporan Tahunan. Inilah wujud transparansi kami atas kebijakan, tata kelola, dan inovasi yang telah kami lakukan. Kami berkeinginan agar para pembaca, pemangku kepentingan, dapat mengenal kami lebih dekat, melihat dampak nyata yang kami berikan bagi masyarakat.

Kami optimistis, Bersama Sahabat, UMi Bangkit!

Salam hangat,



Ririn Kadariyah

Berkarya di Tengah Pandemi Menuju Kebangkitan UMi



2020

Berkarya di Tengah Pandemi



2021

Bersama Sahabat UMi Bangkit

Setelah melalui hantaman ekonomi akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Indonesia mencoba bangkit untuk memulihkan ekonomi. Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM yang berjuang dan beradaptasi terhadap “The New Normal”.

Kami bertekad memberikan dukungan nyata pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengajak pelaku UMKM untuk bangkit dengan semangat baru. Bagi kami, pandemi Covid-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerja memperbaiki dan meningkatkan layanan. Kami berharap agar semakin banyak pelaku UMKM terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan naik kelas.

Beberapa inovasi perbaikan telah kami upayakan. Penyaluran Pembiayaan UMi melalui Penyalur non afiliasi Pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya perluasan jangkauan Pembiayaan UMi. Selain itu, kami juga berupaya melakukan perbaikan tarif sehingga diharapkan dapat menyediakan Pembiayaan UMi yang lebih murah. Kami juga memperkuat kolaborasi sinergi dan kerja sama dengan Penyalur, Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, korporasi hingga organisasi internasional. Peningkatan layanan dilakukan juga dengan menyediakan *contact center* Salam PIP.

Kami senantiasa mendorong Pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang antara lain melalui pemberdayaan perempuan, digitalisasi pembiayaan, subsidi bunga, penyediaan inkubasi bisnis, pemasaran produk melalui lelang UMi, dan Rumah UMi. Kami telah meningkatkan tata kelola sesuai *good governance* dengan penerapan manajemen risiko bisnis dan penilaian BLU *maturity rating*.

Semua upaya dimaksudkan untuk memacu dan memperluas jangkauan penyaluran Pembiayaan UMi, meningkatkan pelayanan BLU sehingga mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan semangat “Bersama Sahabat UMi Bangkit”.

Suwaebah (47 tahun), nasabah UMi, sudah sekitar 6 tahun berjualan kue di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (16 Maret 2022).



Ikhtisar

Mohammad Reza Maulidin (40 Tahun), nasabah UMi, yang sebelumnya bekerja di perhotelan, sekarang menjalani usaha membuat kue, dikarenakan adanya pengurangan karyawan akibat pandemi, Jakarta Timur (16 Maret 2022).



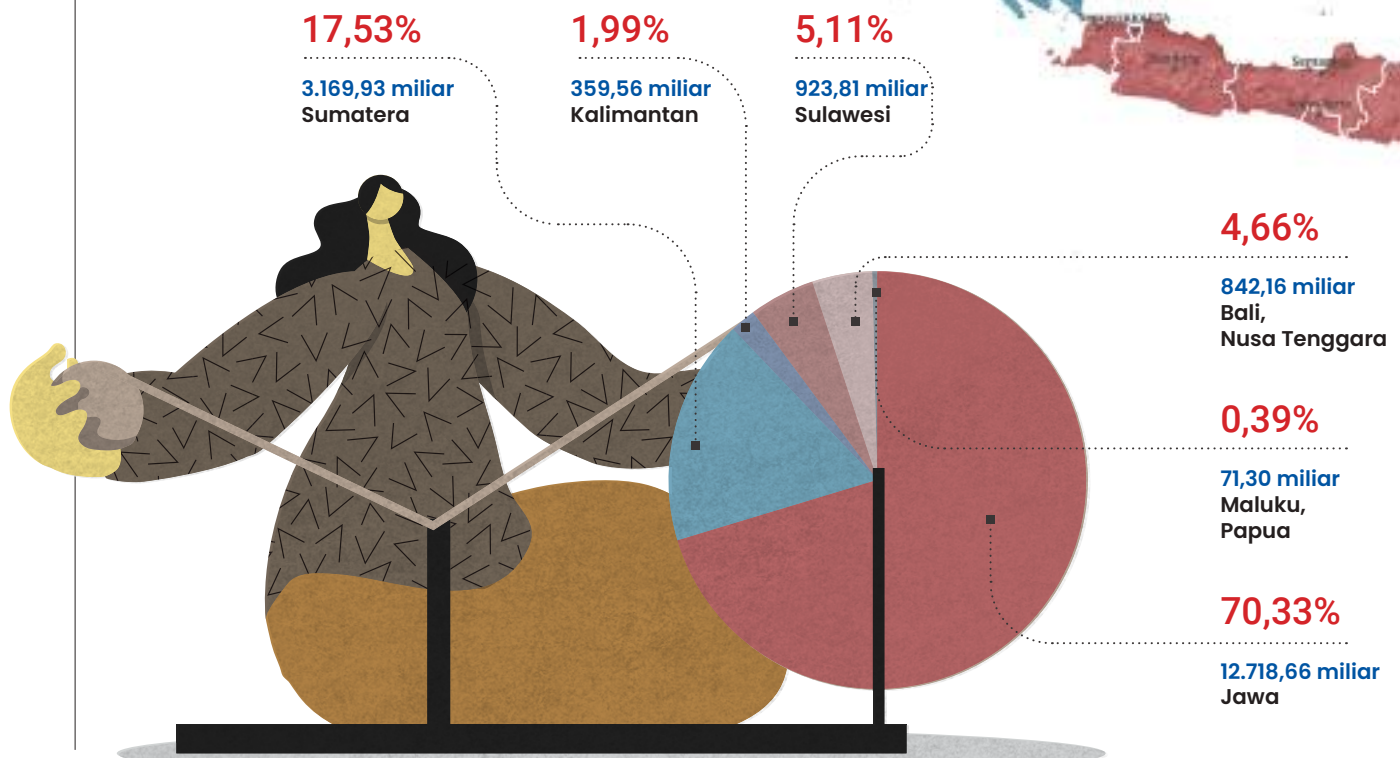
Di Mana Kami Hadir

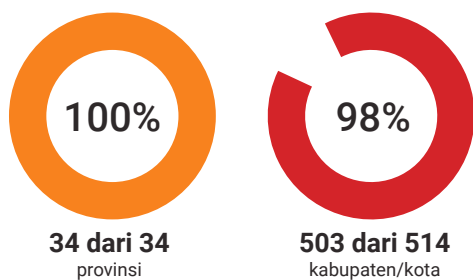
Kami hadir di sini, di sana, di seluruh Indonesia

Kami adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertujuan turut serta mendorong perekonomian melalui pembiayaan sektor usaha Ultra Mikro (UMi). Berprinsip pada pengelolaan dana bergulir yang *prudent*, kami menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku UMi.

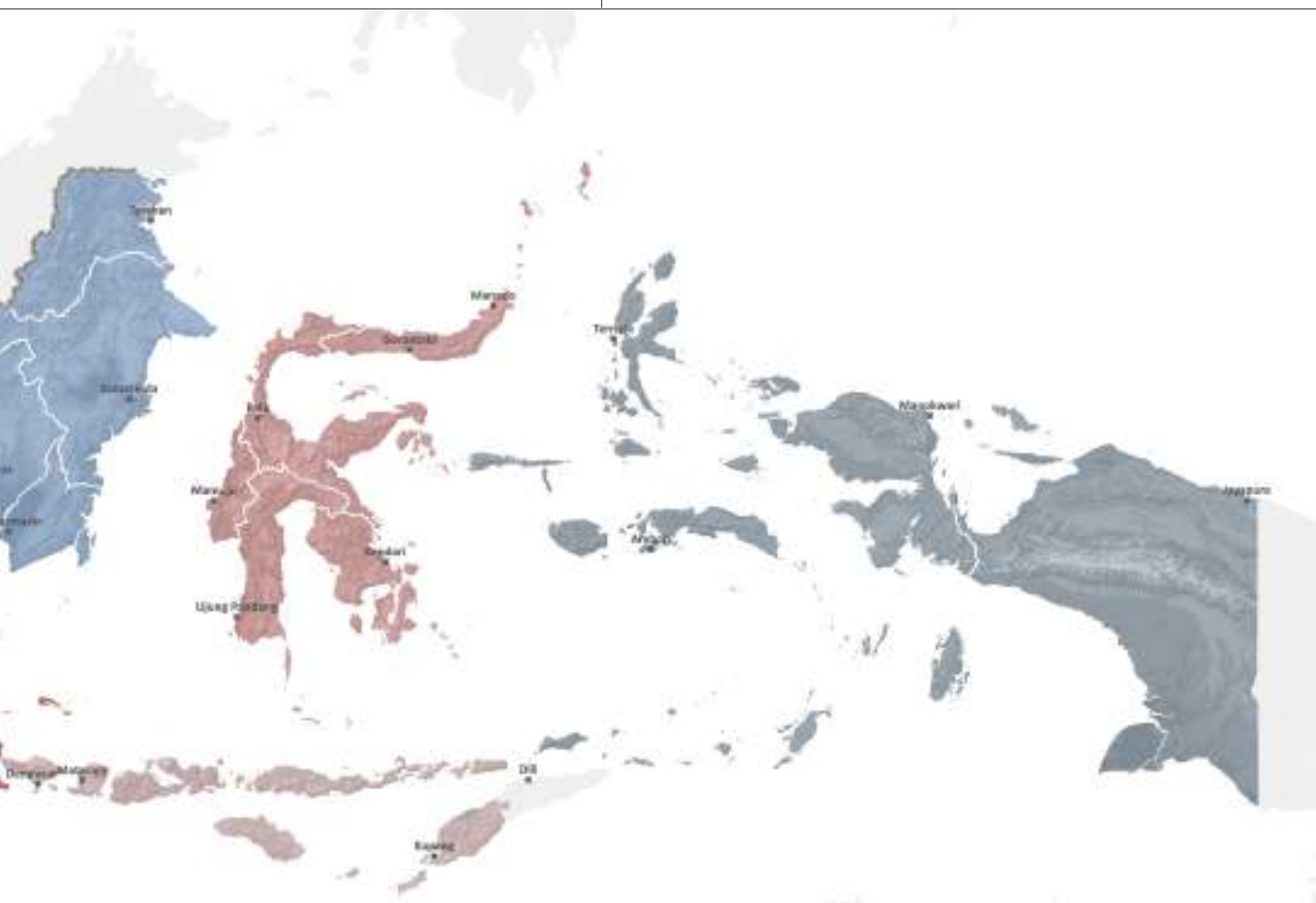
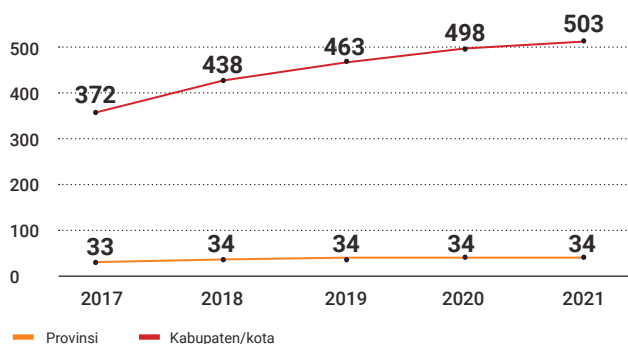
Lima tahun berkarya untuk negeri (2017-2021), layanan kami kini telah menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Tanah Air.

Jumlah Penyaluran





Pertumbuhan Jangkauan Layanan



Aceh 23 kota	Kalimantan Tengah 14 kota	Maluku Utara 7 kota	Jawa Tengah 35 kota
Sumatera Utara 33 kota	Kalimantan Selatan 13 kota	Maluku 11 kota	DIY 5 kota
Riau 12 kota	Kalimantan Timur 9 kota	Papua 26 kota	Jawa Timur 38 kota
Kepulauan Riau 12 kota	Kalimantan Utara 5 kota	Papua Barat 11 kota	
Sumatera Barat 19 kota	Sulawesi Barat 6 kota	Nusa Tenggara Timur 22 kota	
Jambi 11 kota	Gorontalo 6 kota	Nusa Tenggara Barat 10 kota	
Kep. Bangka Belitung 7 kota	Sulawesi Utara 15 kota	Bali 9 kota	
Sumatera Selatan 17 kota	Sulawesi Tengah 12 kota	Banten 8 kota	
Bengkulu 10 kota	Sulawesi Selatan 24 kota	Jakarta 5 kota	
Lampung 7 kota	Sulawesi Tenggara 14 kota	Jawa Barat 27 kota	

Apa yang Telah Kami Lakukan



2021 – Inovasi untuk pemulihan ekonomi

Pemberdayaan Perempuan



Pembiayaan Ramah Perempuan

Dengan pola jemput bola, tanpa agunan, dan berbasis komunitas, pengusaha perempuan lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan dengan tetap mampu menjalankan tugas-tugas perempuan.

Pelatihan & Pendampingan

PIP memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha perempuan, termasuk literasi keuangan, literasi digital, kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan.

Platform Lelang Daring



Untuk memasarkan produk unggulan mitra pelaku UMi, kami menyelenggarakan lelang melalui platform www.lelang.go.id pada 30 Agustus 2021, di bawah koordinasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan sembilan mitra penyalur dan *linkage*, lelang menawarkan 76 paket lelang dari 15 debitur UMi.

Selain berpartisipasi membeli produk, PIP membantu biaya pengiriman hasil lelang.

Digitalisasi Pembiayaan UMi



Selain untuk membantu agar bisnis pelaku UMi tetap berjalan di masa pandemi, penyaluran pembiayaan melalui uang elektronik bertujuan memperkenalkan dunia digital kepada debitur UMi. Ditambah program *UMi Siap Online*, kami berharap pelaku UMi akan lebih siap menjalankan usahanya secara daring.

Hingga akhir 2021, tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) non-afiliasi pemerintah—Koperasi Konsumen An Nisa Kota Batu, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Tamwil (BMT) Bakti Huria, dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera—telah menyalurkan pembiayaan berupa uang elektronik kepada 31 debitur.

Banyak yang telah kami lakukan dan terus akan kami lanjutkan demi mewujudkan misi dan mandat kami; membantu sahabat pelaku UMi terus bertumbuh dan berkembang melalui pembiayaan UMi.

Layaknya sahabat, kami tetap berkomitmen mendampingi pelaku UMi melewati turbulensi perekonomian akibat pandemi COVID-19 serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Inovasi-inovasi kami ciptakan untuk membantu para sahabat pelaku UMi agar terus semangat dan mampu bangkit.

Contact Center Salam PIP



Pada 17 Juni 2021, kami meluncurkan *contact center* Salam PIP. Keberadaan *contact center* ini, kami harapkan dapat membantu para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi tentang Pembiayaan UMi yang lebih cepat. Salam PIP dapat diakses melalui <https://salam.pip.kemenkeu.go.id/>. Pengguna Salam PIP dapat menyampaikan pertanyaan tentang informasi Pembiayaan UMi melalui mekanisme pembuatan tiket. Tiket akan direspons dengan jawaban melalui *email*, dengan maksimal respons layanan yang telah ditentukan.

Pemrosesan Subsidi Bunga



Sebagai salah satu bentuk partisipasi kami dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kami membantu pemrosesan data transaksi dan tagihan dari delapan koperasi mitra PIP melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Rekonsiliasi data yang dihasilkan menjadi dasar pengajuan tagihan subsidi bunga senilai Rp 3,66 miliar kepada Kementerian Koperasi dan UKM.



Sudah dan terus berlanjut...

Memperkuat Kolaborasi dengan mitra penyalur dan mitra program



Pelatihan dan Pendampingan untuk mitra penyalur maupun pelaku UMi



Meningkatkan Tata Kelola



Kaleidoskop



08

Januari 2021

**Audiensi kerja sama Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango**

25

Januari 2021

**Penandatanganan kontak kinerja tahun 2021
antara PIP dengan penyalur Pembiayaan UMi**



20

April 2021

**Penandatanganan
akad Pembiayaan
UMi sebesar Rp 2,5
triliun antara PIP
dengan PT PNM**



29

April 2021

**Penandatanganan
Akad Pembiayaan UMi
sebesar Rp 1 miliar
antara PIP dengan
KSPPS Bakti Huria
Syariah**



29

April 2021

**Pemberian bantuan dana kepada masyarakat & debitur Pembiayaan UMi
korban bencana alam di NTT**





30

April 2021

Pemberian bantuan dan *trauma healing*
di Panti Asuhan Kristen Prailiu Kupang



03

Mei 2021

Penandatanganan
akad Pembiayaan
UMi antara PIP
dengan PT BAV



11-31 THR Belanja UMi
Mei 2021



17 Grand launching
Salam PIP
Juni 2021



27 Penandatanganan kerja
sama antara PIP dengan
pusat inkubator bisnis
Oorange
Agustus 2021



30 Peluncuran Kampanye Bersama
Sahabat UMi Bangkit & Lelang
Produk UMi
Agustus 2021

20 Penandatanganan
kerja sama antara PIP
dengan Badan Inovasi
dan Inkubator Wirausaha
Universitas Brawijaya
(BIIW-UB)
September 2021



02-04

November 2021

**Webinar dan pelatihan
Pekan UMi Bangkit**



13

November 2021

**Sosialisasi Pembiayaan UMi dan KUR, serta
edukasi perpajakan bagi para petani organik
yang tergabung dalam Gabungan Petani Organik
(GUPON) Magelang**



14

November 2021

**Penandatanganan nota
kesepahaman antara
PIP dengan Badan
Pelaksana Otorita
Borobudur (BPOB)**



16 16

November s.d. Desember 2021

Partisipasi dalam BLU Expo 2021



17

November 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PIP dengan Grab Indonesia



02

Desember 2021

Sosialisasi Pembiayaan UMi kepada koperasi calon penyalur UMi dan perwakilan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)



16-17
Desember 2021

Festival UMi



21

Desember 2021

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PIP dengan PT Mekar Investama Sampoerna



22

Desember 2021

Penandatanganan nota kesepahaman antara PIP dengan UN Woman



28

Desember 2021

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PIP dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB)



28

Desember 2021

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PIP dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan PT Pegadaian



Dampak Positif dan Kinerja PIP

Lebih banyak pelaku UMi merasakan dampak positif kehadiran kami

Menjadikan manusia Indonesia lebih sejahtera melalui akses terhadap kredit usaha adalah tujuan kami sebagai koordinator pembiayaan UMi.

Dari tahun ke tahun, kami selalu berhasil melampaui target jumlah debitur penerima pembiayaan UMi. Pencapaian ini membuktikan bahwa kehadiran BLU-PIP memang dibutuhkan oleh pelaku UMi. Tentu, ini menambah semangat kami.

Total Debitur UMi 2021

1.958.224



Tumbuh 11% dari
tahun 2020

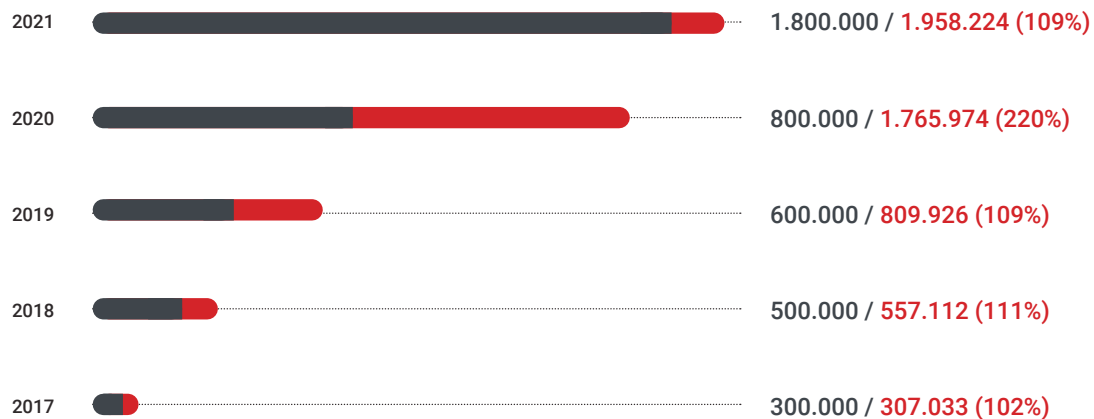
Capaian Debitur di Tahun 2021

109%



dari target
1.800.000

Pertumbuhan Debitur



■ Target Debitur ■ Realisasi Debitur

Total debitur 2017-2021: 5.398.269

Kami percaya, satu-satunya jalan agar kami bisa mempersembahkan kinerja keuangan yang baik adalah dengan memberikan dampak positif sebesar-besarnya bagi pelaku UMi.

Inilah, dampak positif kami bagi pelaku UMi...

Capaian di Tahun 2021

Rp7.034,62 miliar



Tumbuh 17% dari tahun 2020

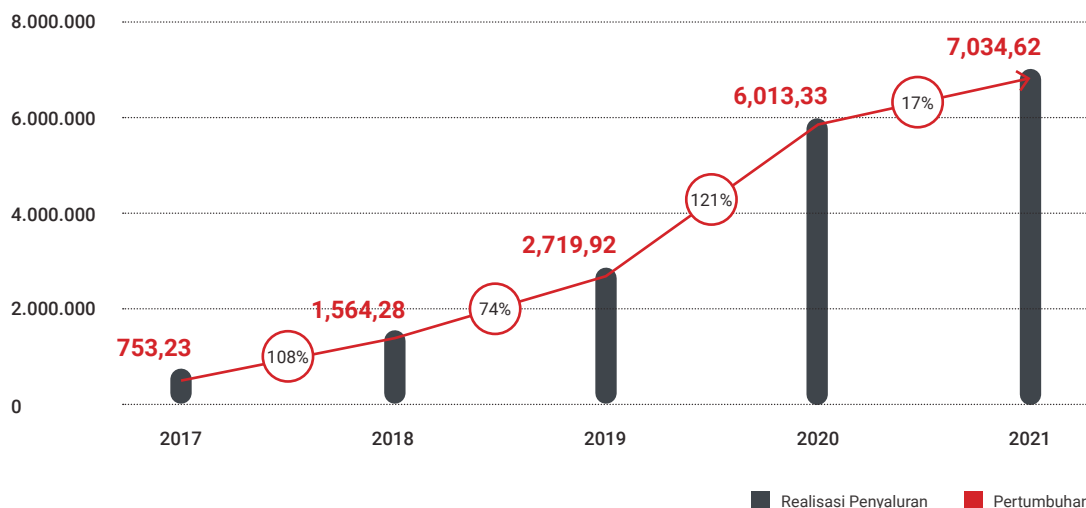
Total Pembiayaan UMi 2017-2021

Rp18.085,41 miliar



Tumbuh rata-rata 1,79% per tahun

Realisasi Pembiayaan UMi



Perempuan paling merasakan dampak positif kehadiran kami

Kami percaya, perempuan merupakan penopang utama keluarga – di mana satu perempuan sejahtera, maka satu keluarga turut menjadi sejahtera. Sebagai bukti nyata, lima tahun kiprah kami, perempuan selalu menjadi penerima utama pembiayaan UMi.

Skema tanggung renteng mendominasi pembiayaan UMi. Skema pembiayaan berbasis komunitas ini ternyata sangat sesuai bagi karakter perempuan, pelaku UMi.

2017 - 2021

94,75%

5.114.783

adalah debitur perempuan



2021

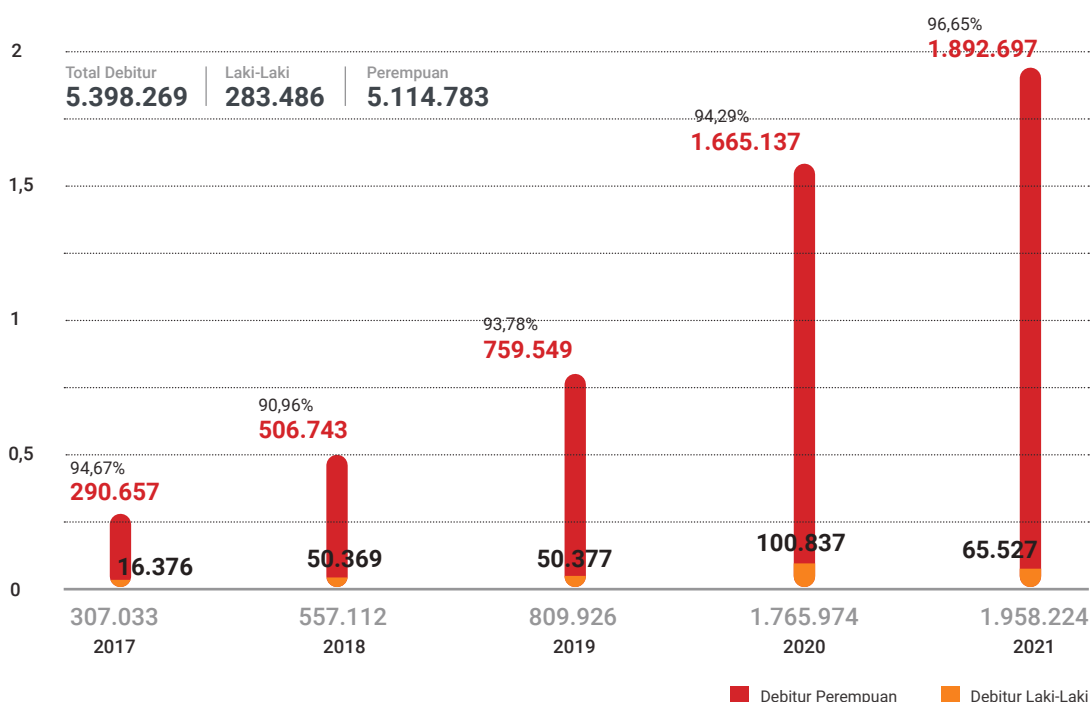
96,65%

1.892.697

adalah debitur perempuan

Ini merupakan rekor tertinggi persentase debitur perempuan sejak tahun 2017.

Komposisi Debitur



Nilai pembiayaan yang kami berikan bagi pelaku UMi perempuan juga terus meningkat.

Nilai Penyaluran



Rp 16.652,11 Miliar

disalurkan kepada pelaku UMi perempuan

Total: Rp 18.085,41 Miliar

Nilai Penyaluran



Rp 6.733,83 Miliar

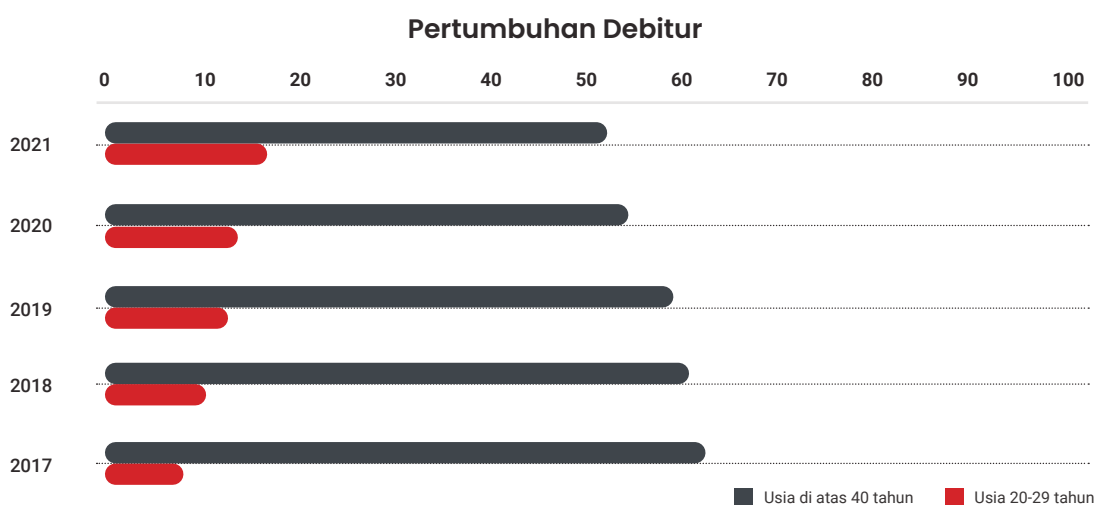
mengalir ke pelaku UMi perempuan

Total: Rp 7.034,62 Miliar

PIP turut mendorong pertumbuhan pengusaha muda

Jumlah pelaku UMi di bawah 30 tahun terus meningkat

Kendati pelaku UMi dengan usia 40 tahun ke atas masih mendominasi penerima pembiayaan UMi, persentasenya terus turun. Sebaliknya, porsi pelaku UMi usia 20-29 tahun konsisten meningkat sejak tahun 2017.



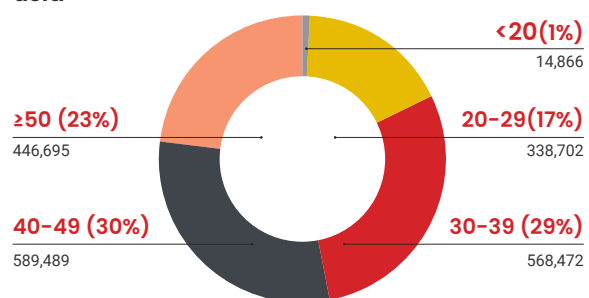
Komposisi penerima yang semakin berimbang

47% Penerima pembiayaan usia di bawah 40 tahun

Sejalan dengan pergeseran usia penerima pembiayaan UMi, komposisi penyaluran pembiayaan PIP menjadi semakin berimbang: 47% penerima pembiayaan UMi berusia di bawah 40 tahun sementara 53% berusia di atas 40 tahun.

Debitur berdasarkan usia

Total: 1,958,224



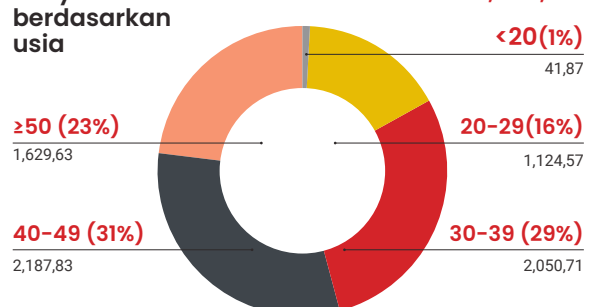
Porsi pembiayaan untuk pelaku UMi muda terus meningkat

46% Porsi pembiayaan untuk pelaku UMi usia di bawah 40 tahun

Secara nilai nominal, penyaluran pembiayaan untuk pelaku UMi berusia di bawah 40 tahun terus mengalami peningkatan.

Penyaluran UMi berdasarkan usia

Total: 7,034,62



Pembiayaan UMi mendorong pemerataan dan keekonomian

91%

Jumlah debitur dengan nilai pembiayaan Rp 5 juta ke bawah

Kendati mampu memberikan pembiayaan hingga Rp 20 juta per debitur, sebagian besar pembiayaan UMi bernilai Rp 5 juta ke bawah. Dengan demikian, lebih banyak pelaku usaha bisa dijangkau dengan pembiayaan UMi sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

Pembiayaan per plafon selama 2021

Plafon	Debitur	%	Penyaluran (miliar rupiah)	%
0 - 2.500.000	352.729	18%	665,26	9%
2.500.001 - 5.000.000	1.433.004	73%	5.096,94	72%
5.000.001 - 7.500.000	130.513	7%	875,07	12%
7.500.001 - 10.000.000	39.737	2%	357,61	5%
>10.000.000	2.241	0%	39,73	1%
Total	1.958.224	100%	7.034,62	100%

Pembiayaan per plafon 2017–2021

Plafon	Total Debitur	%	Total Penyaluran (miliar rupiah)	%
0 - 2.500.000	1.915.536	35%	3.819,79	21%
2.500.001 - 5.000.000	3.000.721	56%	10.608,32	59%
5.000.001 - 7.500.000	312.678	6%	2.080,17	12%
7.500.001 - 10.000.000	167.093	3%	1.537,39	8%
>10.000.000	2.241	0%	39,73	0%
Total	5.398.269	100%	18.085,41	100%

52,64

Nilai keekonomian debitur UMi di tahun 2021

Nilai keekonomian debitur UMi di tahun 2021 naik 2,79 poin, dari 49,85 di semester I-2020 (*baseline*) menjadi 52,64 di semester I tahun 2021 (*endline*). Ini mengindikasikan, pembiayaan UMi dapat memberikan dampak positif bagi keekonomian pribadi maupun keekonomian usaha debitur. Capaian ini searah dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021, yang mampu mencatatkan pertumbuhan setelah sempat mengalami resesi di tahun 2020.

Dampak Pembiayaan UMi pada UMKM Indonesia

Periode *baseline* semester I 2020 –
endline semester I 2021

Hasil survey secara *baseline* dan *endline*:

Nilai Keekonomian Debitur

Baseline

49,85

Endline

52,64



Terdapat peningkatan
skor sebesar +2,79

Nilai Keekonomian Pribadi

Baseline

41,31

Endline

43,49



Terdapat peningkatan
skor sebesar 2,18

Nilai Keekonomian Usaha

Baseline

8,54

Endline

9,14



Terdapat peningkatan
skor sebesar 0,60

Indicator	Baseline Semester 1 2020	Endline Semester 1 2021	Selisih	Skor Maksimal
Pengeluaran Listrik	3,40	3,41	+0,01	6
Pengeluaran Konsumsi	3,68	3,84	+0,16	6
Kondisi Lantai Rumah	6,91	7,23	+0,32	9
Kondisi Sanitasi	7,40	7,72	+0,32	9
Rasio Anak Tidak Sekolah	11,19	11,33	+0,14	12
Kendaraan Operasional	4,06	4,18	+0,12	9
Tabungan	4,67	5,78	+1,11	19
Total Nilai Keekonomian Pribadi	41,31	43,49	+2,18	70
Aset Usaha	2,81	3,24	+0,43	10
Omzet Usaha	4,81	4,96	+0,16	10
Tenaga Kerja	0,92	0,94	+0,02	10
Total Nilai Keekonomian Usaha	49,85	52,64	+0,60	30
Total Nilai Keekonomian Debitur	49,85	52,64	+2,79	100

Kinerja Keuangan PIP



Dana kelolaan PIP memiliki *leverage* atau daya ungkit sebesar

1,8 X

Leveraging Dana Kelolaan

Dari tahun 2017 hingga 2021, PIP mengelola dana yang berasal dari APBN senilai total Rp 10 triliun. Per 31 Desember 2021, piutang ke lembaga penyalur pembiayaan UMi mencapai Rp 5,50 triliun dan Rp 4,50 triliun dalam bentuk kas di rekening giro. Dana ini akan dipakai untuk pembiayaan UMi pada tahun 2022.

Dengan dana APBN sebesar Rp 10 triliun, PIP mampu memberikan pembiayaan kepada pelaku UMi dengan nilai Rp 18,09 triliun. Dengan demikian, penempatan dana PIP memiliki *leverage* atau daya ungkit sebesar 1,8 kali.

Seiring dengan kebangkitan pelaku UMi yang merasakan dampak positif dari pembiayaan dan pelatihan yang kami berikan, kami mampu mempersembahkan kinerja keuangan yang baik.

NPL Rendah

Lima tahun menyalurkan pembiayaan UMi, angka kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) kami tetap terjaga di angka 0,25%.



0,25%

NPL dari *outstanding*
Rp 5,50 triliun

Pendapatan Investasi Melewati Target

PIP memiliki dua sumber penerimaan, yakni pendapatan layanan investasi dan pendapatan non-layanan investasi.

Pendapatan layanan investasi adalah nilai tambah atau manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan penyaluran pembiayaan UMi berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.05/2021. Sedangkan, pendapatan non-layanan investasi merupakan pendapatan optimalisasi kas dari saldo dana kelolaan dan saldo dana operasional yang *idle*. Optimalisasi kas dilakukan melalui instrumen investasi jangka pendek, berbentuk deposito berjangka.

Kami berhasil membukukan pendapatan, baik dari layanan investasi maupun non-layanan investasi, lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021.



103%

dari target pendapatan
investasi 2021

Jenis Pendapatan	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi
Pendapatan Layanan Investasi	180,35	182,30	101%
Pendapatan Non Layanan Investasi	120,23	127,46	106%
Total	300,58	309,77	103%

5 Tahun Berkarya untuk Indonesia

Kerja sama dengan LKBB non-afiliasi pemerintah merupakan sebuah lompatan bagi kami. Langkah ini mencerminkan keyakinan kami terhadap tata kelola, terutama dalam hal pengelolaan risiko, yang kami terapkan secara konsisten dan terus kami perbaiki sejak kami menerima mandat.

Lompatan lain yang patut kami syukuri adalah penggunaan uang elektronik dalam penyaluran Pembiayaan UMi.

Transformasi digital ini mempermudah dan mempercepat penyaluran pembiayaan kepada UMi, sejalan dengan misi kami.

2017

- PIP lahir
- Skema Pembiayaan UMi
- *Launching & piloting* pembiayaan UMi
- Kajian uji skema pembiayaan UMi

2018

- Kerja sama dengan 18 penyalur
- *Piloting* penyaluran dana APBD Kabupaten Bone Bolango
- *Piloting* digitalisasi pembiayaan

2019

- 40 LKBB* menjadi penyalur, bertambah 120% dari 2018

*LKBB=lembaga keuangan bukan bank

2020

- Peluncuran pembiayaan syariah
- Minimal 40% pembiayaan untuk pelaku UMi luar Jawa

- Plafon naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta per debitur
- Regulasi untuk penyalur dari LKBB non-afiliasi pemerintah

2021

- 8 LKBB non-afiliasi pemerintah menjadi penyalur
- Penyaluran via uang elektronik sampai ke *end-user/debitur*
- Peluncuran *contact center* Salam PIP
- Penerapan pola tarif layanan berorientasi penurunan tingkat bunga pada nasabah

- Program inkubasi UMi
- Pembiayaan untuk petani via LKM-Agribisnis
- Inisiasi pembiayaan via *peer-to-peer lending*
- Proteksi/ asuransi jiwa bagi debitur aktif UMi
- Inisiasi forum komunikasi auditor internal BLU

Mitra Kami

Keberhasilan kami menjangkau para sahabat pelaku UMi, tidak terlepas dari peran para sahabat kami; mitra penyalur, baik langsung maupun *linkage*, serta mitra program. Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para mitra sekalian. Terima kasih!

Mitra Penyalur Langsung

- > PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
- > PT Pegadaian
- > PT Bahana Artha Ventura
- > Koperasi Pondok Pesantren BMT An Nur
- > KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
- > Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Kota Batu
- > KSPPS BMT Bakti Huria Syariah
- > KSP Karya Baitul Mandiri
- > LKMA Anugerah Tani Makmur
- > LKMA Mojo Agung Sejahtera
- > PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia

Mitra Linkage

- > KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama
- > KSPPS BTM Amanah Bina Insan
- > KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto
- > KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional
- > KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional
- > KSPPS BMT Mentari Muamalat Mandiri
- > KSPS BMT UGT Sidogiri
- > KSU Krama Bali
- > KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068
- > KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem
- > KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
- > KSPPS Nur Insani
- > KSPPS Benteng Mikro Indonesia
- > KSPPS Abdi Kerta Raharja
- > KSP KUD Mintorogo
- > KSPPS BMT Artha Sejahtera
- > KSSU BMT Mitra Usaha Mulia
- > KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri
- > KJKS BMT Nuansa Umat
- > KSPPS Artha Bahana Syariah
- > KSP Pangestu
- > KSPPS BMT Nurul Bahri



55

mitra
dalam 5 tahun

- > KSPPS BMT Pradesa Finance Mandiri
- > Koperasi Mitra Dhuafa
- > KSPPS BMT Itqan
- > KSPPS Baytul Ikhtiar
- > KSPPS BMT Alhuda
- > KSPPS BMT Bersama Surya Mandiri
- > KSPPS BMT Marhamah
- > KSPPS BMT Melati
- > KSPPS Tamzis Bina Utama
- > KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi
- > KSPPS BMT Harapan Bersama
- > Koperasi LKMA Anugerah Tani Makmur
- > Koperasi Tani Agribisnis Tanamsari
- > Koperasi LKMA Blorok Makmur Sejahtera
- > KSPPS BMT Kospin Syariah
- > KSU Karya Abadi
- > KSPPS BMT El Labana
- > KSPPS BMT Bina Niaga Utama
- > KSPPS Nusa Ummat Sejahtera
- > KSPPS Al Amanah Sumedang
- > KSPPS BMT El Anugrah Sejahtera
- > KSPPS BMT Amanah Ray*

* sudah tidak beroperasi

Pembiayaan ultra mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.





Pembiayaan UMi

Ibu listiyawati (43 tahun), nasabah UMi yang sudah sekitar 8 tahun menjalani usaha membuka warung nasi di Jakarta Timur (16 Maret 2022).



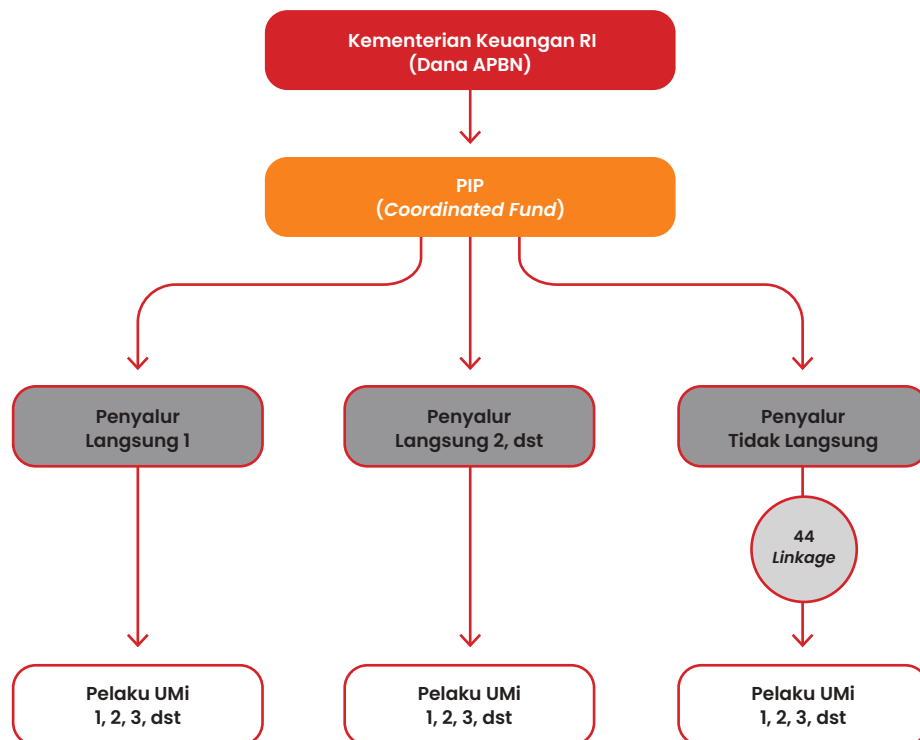
Apa itu Pembiayaan UMi?

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga termasuk signifikan. Namun, mereka umumnya belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum *bankable*.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan Pembiayaan UMi sebagai salah satu Program Prioritas Nasional agar usaha ultra mikro bisa tumbuh berkembang, naik kelas menjadi *bankable*, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.



Ekosistem Pembiayaan UMi



Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI memberikan mandat kepada PIP untuk menjadi *coordinated fund* Pembiayaan UMi. Untuk melaksanakan mandat tersebut, PIP menerima alokasi dana dari APBN. Hingga akhir 2021, pendanaan APBN pada PIP mencapai Rp 10 triliun.

PIP sebagai pengelola dana tidak secara langsung menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha Ultra Mikro. Dana dari PIP disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik sebagai penyalur langsung, penyalur tidak langsung, maupun *linkage*.

Mekanisme penyaluran melalui mitra penyalur tersebut bertujuan agar prinsip *know-your-customer* (KYC) benar-benar bisa diterapkan. Hal ini disebabkan mitra penyalur mengenal karakteristik debitur sehingga angka kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) bisa ditekan serendah mungkin.

Untuk memaksimalkan pendanaan dari APBN, mitra penyalur wajib menggulirkan sisa dana yang belum jatuh tempo dalam bentuk Pembiayaan UMi. Dengan modal Rp 10 triliun, nilai Pembiayaan UMi pada akhir 2021 bisa mencapai Rp 18,09 triliun.

Mulai tahun 2021, PIP menjalin kerja sama dengan LKBB non-afiliasi pemerintah. Delapan (8) LKBB non-afiliasi pemerintah telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Pembiayaan UMi.

Tiga LKBB non-afiliasi pemerintah telah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMi, yaitu Kooperasi Konsumen Syariah An Nisa, KSPPS Bhakti Huria Syariah, dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Syariah.

Hingga akhir 2021, PIP telah bekerja sama dengan 55 mitra penyalur, terdiri dari 10 penyalur langsung, 1 penyalur tidak langsung, dan 44 lembaga *linkage*.

Adapun, jumlah debitur Pembiayaan UMi per 31 Desember 2021 mencapai 5,39 juta pelaku UMi.



Syarat Pembiayaan UMi

- > Pelaku UMi perorangan maupun kelompok
- > Kebutuhan modal maksimal Rp 20 juta
- > Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- > Memiliki KTP elektronik



Karakteristik Pembiayaan UMi

- > Dana bergulir
- > Berbasis komunitas/tanggung renteng
- > Jemput bola





Cara Pencairan Pembiayaan UMi

- > Tunai
- > Uang elektronik (wajib bagi penyalur non-afiliasi pemerintah)



Mitigasi Risiko

PIP menggunakan *database credit scoring* untuk menganalisis kelayakan calon mitra penyalur dan pemberian pembiayaan kepada mitra penyalur.

PIP meminta jaminan dari mitra penyalur, berupa fidusia piutang lancar, minimal sama dengan nilai *outstanding* pembiayaan.

PIP bisa meminta jaminan tambahan, seperti *personal guarantee* dari pengurus/direksi LKBB atau *cash collateral*.

PIP menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi – yang terkoneksi langsung dengan SIKP KUR – untuk memonitor dan mengevaluasi penyaluran dan pengguliran dana pembiayaan UMi oleh mitra penyalur.

Fitur Khas Pembiayaan UMi

Pendampingan

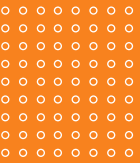
Mitra penyalur pembiayaan UMi wajib melakukan pendampingan untuk debitur UMi sebagai bentuk pemberdayaan pelaku UMi, yang mayoritas belum *bankable*, belum memiliki usaha yang layak, dan belum mampu mengelola keuangan usaha dengan baik. Debitur UMi wajib mengikuti program pendampingan ini dan mitra penyalur wajib menyerahkan laporan pendampingan per semester kepada PIP.

Pelatihan

PIP juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan universitas, untuk memberikan program inkubasi, literasi, dan berbagai pelatihan yang bermanfaat bagi debitur UMi.

Sinergi Pendanaan

PIP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain untuk memperbesar pendanaan yang dapat disalurkan untuk pembiayaan UMi.



Profil Penyaluran Pembiayaan UMi

Penyaluran Pembiayaan UMi Berdasarkan Wilayah

2017 – 2021

Rp18.085,41 miliar total penyaluran

70,33%

12.718,66 miliar

Jawa

17,53%

3.169,93 miliar

Sumatra

1,99%

359,56 miliar

Kalimantan

5,11%

923,81 miliar

Sulawesi

4,66%

842,16 miliar

Bali, Nusa Tenggara

0,39%

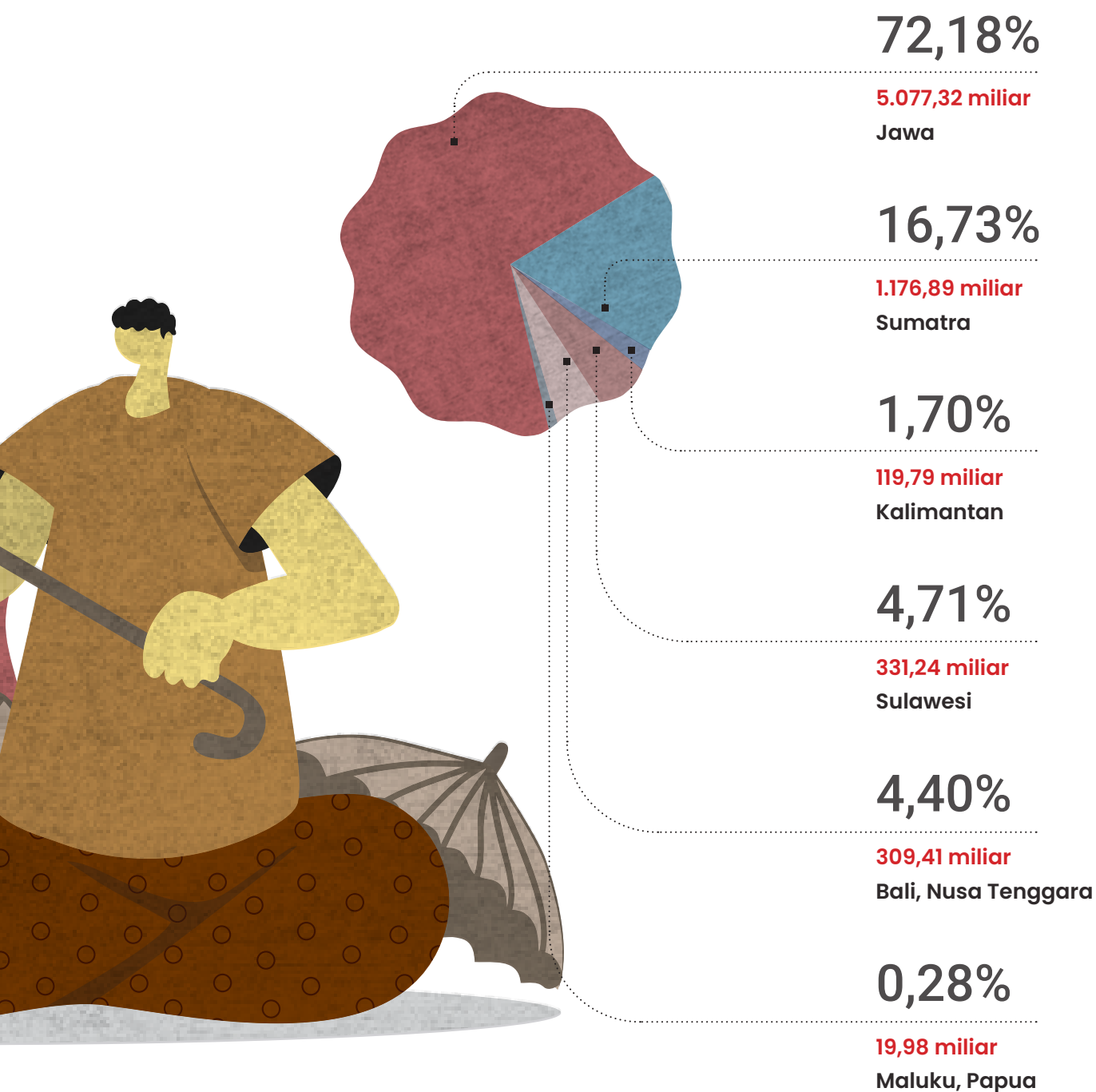
71,30 miliar

Maluku, Papua



2021

Rp7.034,62 miliar



Penyaluran Pembiayaan UMi Berdasarkan Sektor

2017 – 2021

94,48% disalurkan ke sektor perdagangan eceran

1,09%

197,91 miliar
Industri
Pengolahan

0,92%

165,90 miliar
Jasa

3,51%

635,31 miliar
Perikanan
Pertanian &
Perkebunan

94,48%

17.086,30 miliar
Perdagangan
Eceran



2021

95,48% disalurkan ke sektor perdagangan eceran

95,48%

6.716,95 miliar
Perdagangan
Eceran

3,24%

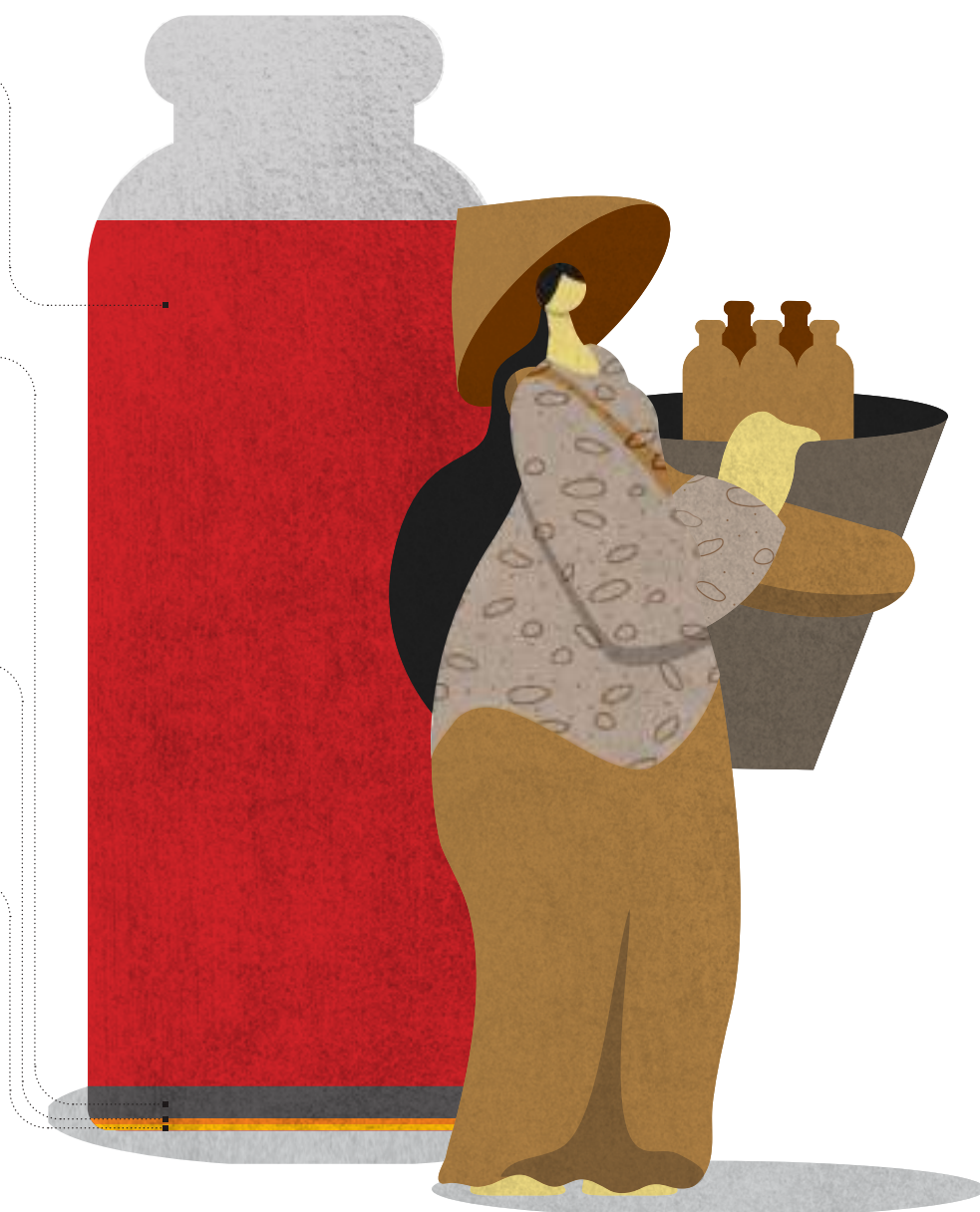
227,58 miliar
Perikanan,
Pertanian &
Perkebunan

0,85%

59,65 miliar
Jasa

0,43%

30,52 miliar
Industri
Pengolahan



Model Penyaluran Pembiayaan UMi

2017 – 2021

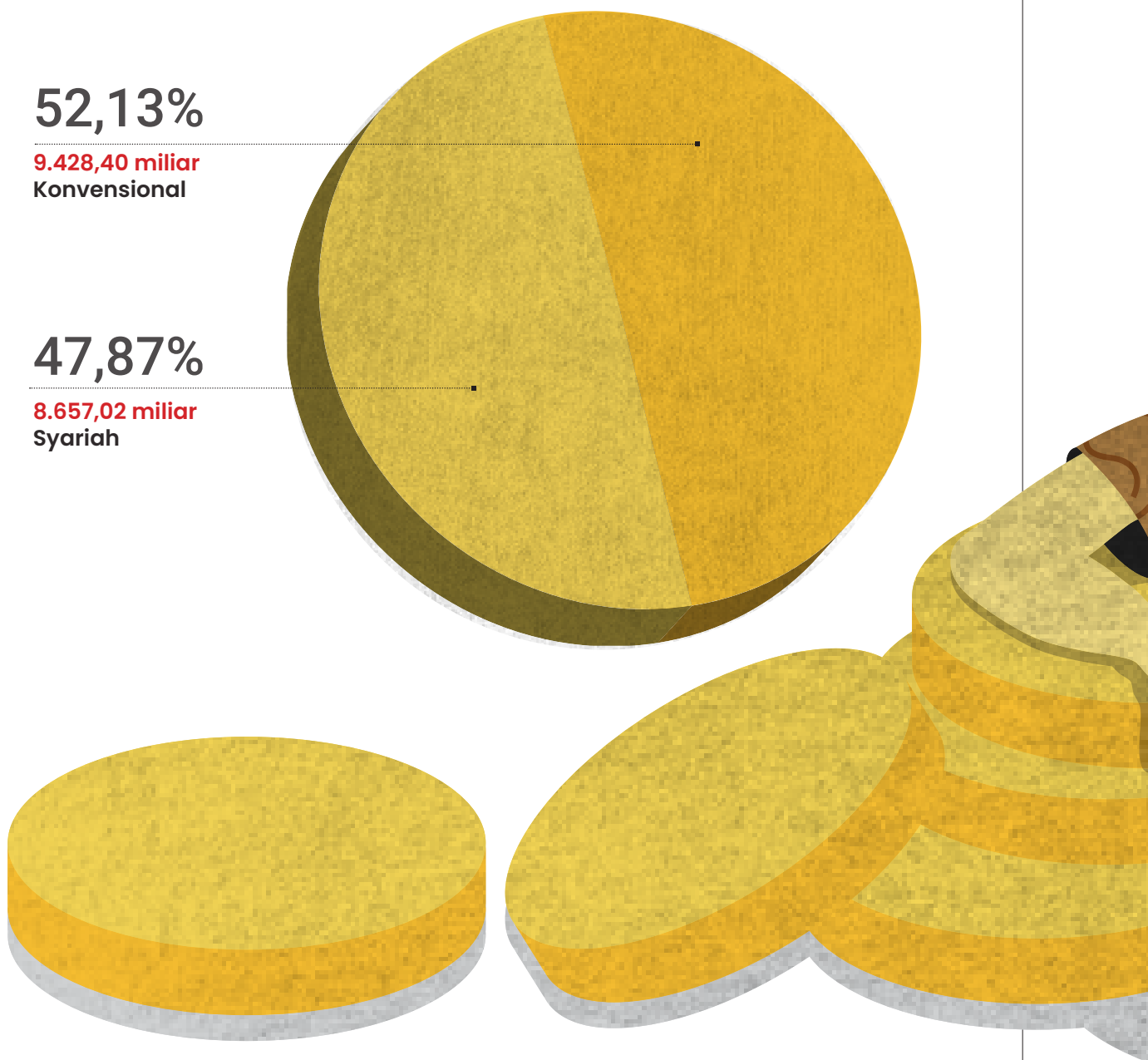
47,87% dalam bentuk
pembiayaan syariah

52,13%

9.428,40 miliar
Konvensional

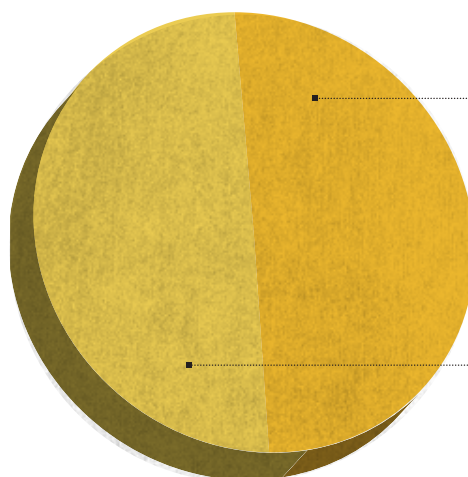
47,87%

8.657,02 miliar
Syariah



2021

49,45% dalam bentuk
pembiayaan syariah



50,55%

3.556,28 miliar
Konvensional

49,45%

3.478,35 miliar
Syariah

Penyaluran Pembiayaan UMi Berdasarkan Plafon

2017 – 2021

79,78% plafon ≤ Rp 5 juta

21,12%

3.819,79 miliar
0–2.5 Juta

58,66%

10.608,32 miliar
2.5–5 Juta

11,50%

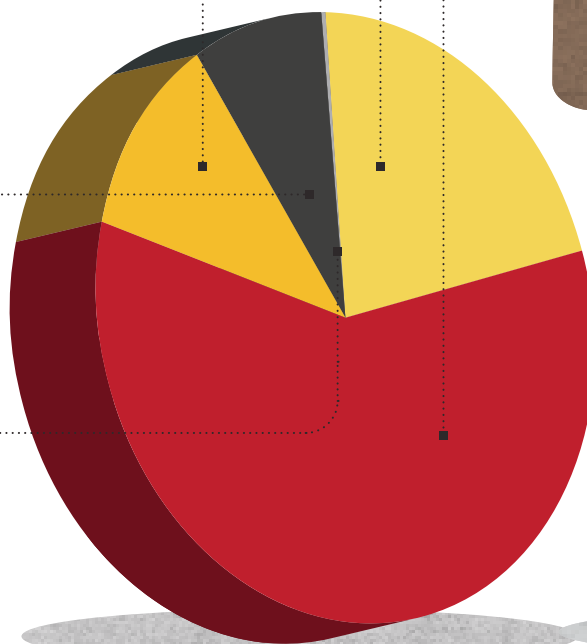
2.080,18 miliar
5–7.5 Juta

8,50%

1.537,40 miliar
7.5–10 Juta

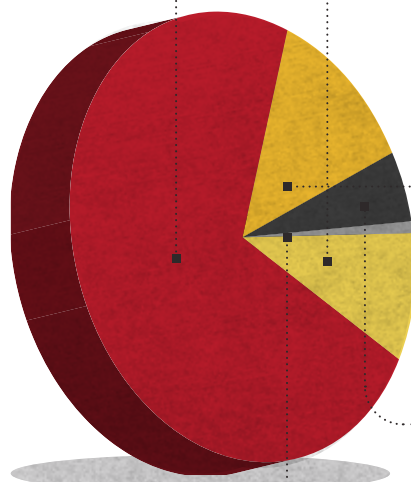
0,22%

39,73 miliar
>10 Juta



2021

81,92% **plafon**
≤ Rp 5 juta



9,46%
665,26 miliar
0-2.5 Juta Rupiah

72,46%
5.096,94 miliar
2.5-5 Juta Rupiah

12,44%
875,08 miliar
5-7.5 Juta Rupiah

5,08%
357,62 miliar
7.5-10 Juta Rupiah

0,56%
39,73 miliar
>10 Juta Rupiah

Penyaluran Pembiayaan UMi Berdasarkan Gender

2017 – 2021

92,07% disalurkan ke
pengusaha perempuan

7,93%

1.433,30 miliar
Laki-laki

92,07%

16.652,12 miliar
Perempuan



2021

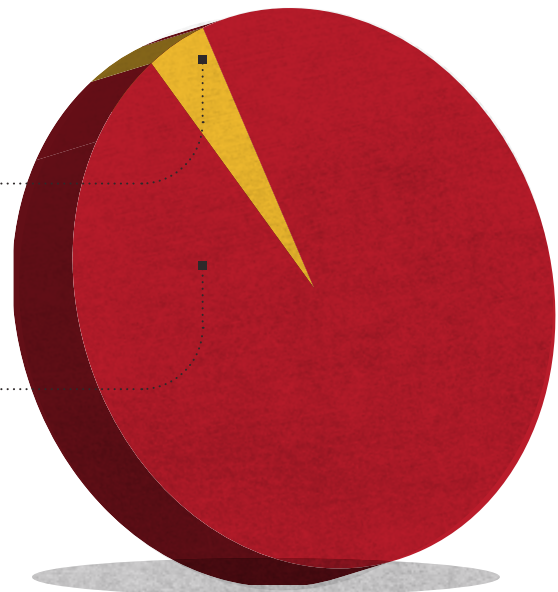
95,72% disalurkan ke
pengusaha perempuan

4,28%

300,80 miliar
Laki-laki

95,72%

6.733,83 miliar
Perempuan



Penyaluran Pembiayaan UMi Berdasarkan Usia

2017 – 2021

41,88%

disalurkan ke pengusaha muda (di bawah 40 tahun)

0,27%

48,15 miliar
<20 tahun

13,01%

2.353,41 miliar
20–29 tahun

28,60%

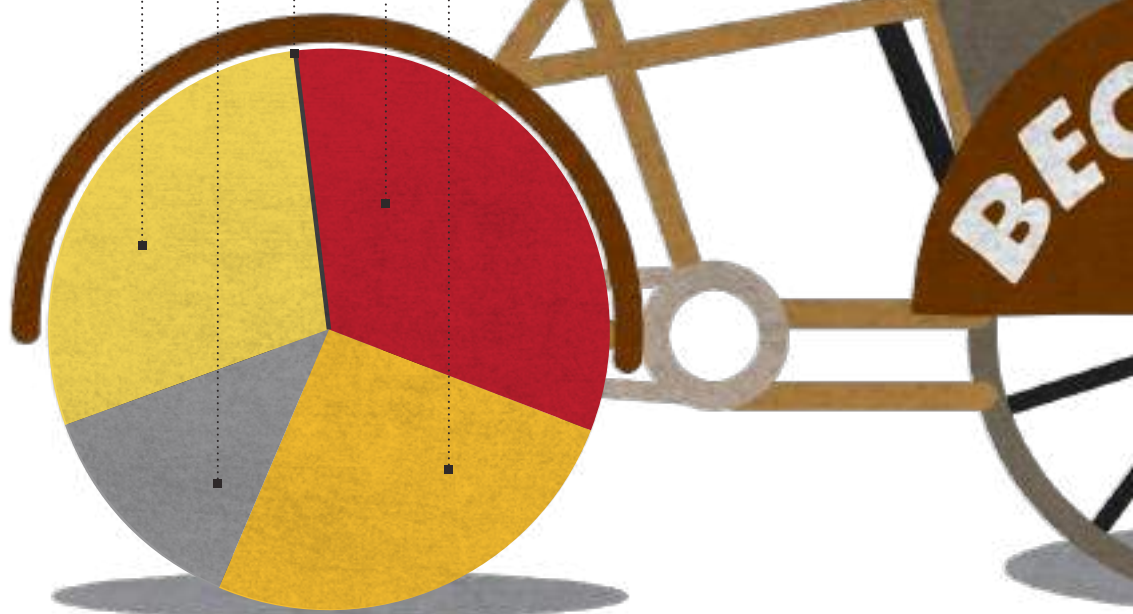
5.172,39 miliar
30–39

32,66%

5.907,47 miliar
40–49 tahun

25,46%

4.603,99 miliar
>50 tahun



2021

45,74% disalurkan ke pengusaha muda (di bawah 40 tahun)



0,60%

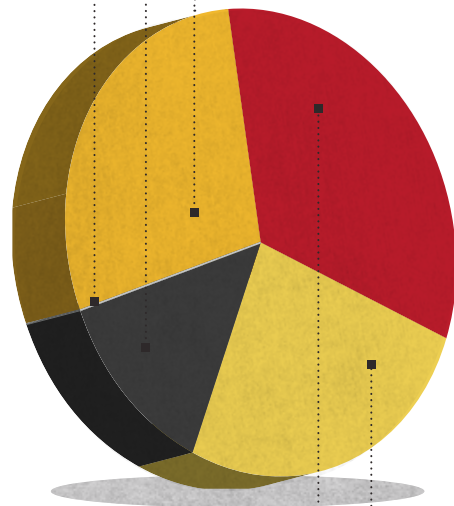
41,87 miliar
<20 tahun

15,99%

1.124,57 miliar
20-29 tahun

29,15%

2.050,71 miliar
30-39



31,10%

2.187,83 miliar
40-49 tahun

23,17%

1.629,63 miliar
>50 tahun



Tata Kelola



Wendi (47 tahun), nasabah UMI, penjual tanaman hias di daerah Kabupaten Bogor (18 Maret 2022).

Sistem Pengendalian Risiko Bisnis

Kecukupan
Pengendalian Intern

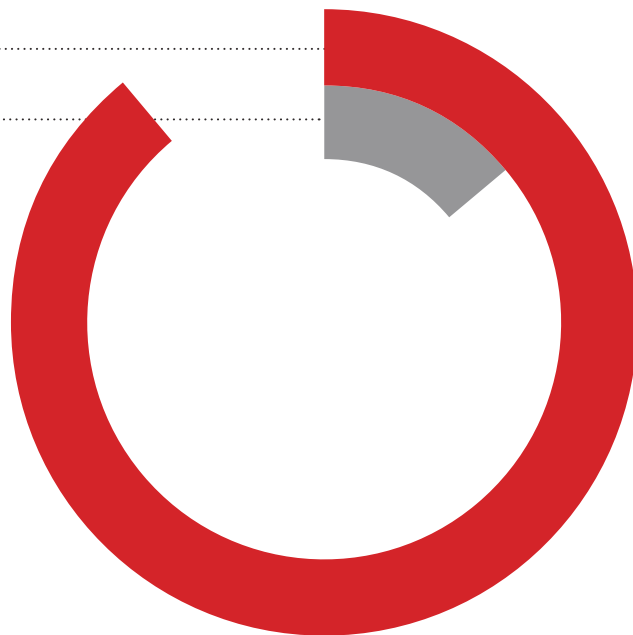
89

Status:
KUAT

Risiko Bawaan

14

Status:
SEDANG



Kami meyakini, tata kelola yang baik mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan UMi. Dalam rangka membangun tata kelola yang baik, PIP menyusun Sistem Pengendalian Risiko Bisnis (SPRB) agar bisa mengembangkan bisnis pembiayaan UMi dengan risiko yang terkendali dan mitigasi yang memadai.

Secara umum, SPRB PIP mempertimbangkan dua aspek, yakni *inherent risk* atau risiko yang melekat pada penyaluran pembiayaan dan *internal control* atau pengendalian intern yang mengadopsi konsep manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diterapkan oleh lembaga pembiayaan sejenis dan perbankan. Lebih detail, kami mengelompokkan ke dalam delapan risiko, yakni risiko keuangan, risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko *fraud*, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko kredit, dan risiko operasional.

Dengan sistem pengendalian risiko bisnis yang memadai, PIP mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini, menindaklanjuti permasalahan lebih cepat dan tepat, serta mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga bisnis PIP lebih terjaga dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola, PIP melaporkan hasil perhitungan risiko bisnis komposit per semester kepada Pembina dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai, pada tahun 2021, kami telah menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Berikut, hasil *risk assessment* atas penerapan manajemen risiko PIP pada tahun 2021, per jenis risiko secara komposit tahunan:

**Risk assessment atas penerapan manajemen risiko
PIP pada tahun 2021**

Jens Risiko	Risiko Bawaan			Kecukupan Pengendalian Intern			Risiko Netto
	Nilai	Porsi	Nilai Tertimbang	Nilai	Porsi	Nilai Tertimbang	
	Status		Status	Status		Status	
Risiko keuangan	14	20%	2,8	86	20%	17,2	80 Risiko Terkendali
	Sedang			Kuat			
Risiko Kebijakan	11	10%	1,1	86	10%	8,6	83 Risiko Diterima
	Rendah			Kuat			
Risiko Reputasi	19	15%	2,85	86	15%	12,9	70 Risiko Terkendali
	Tinggi			Kuat			
Risiko Fraud	15	5%	0,75	86	5%	4,3	75 Risiko Terkendali
	Sedang			Kuat			
Risiko Legal	11	5%	0,55	86	5%	4,3	83 Risiko Diterima
	Rendah			Kuat			
Risiko Kepatuhan	14	10%	1,4	96	10%	9,6	80 Risiko Terkendali
	Sedang			Kuat			
Risiko Kredit	11	20%	2,2	96	20%	19,2	90 Risiko Diterima
	Rendah			Kuat			
Operasional	18	15%	2,7	86	15%	12,9	73 Risiko Terkendali
	Tinggi			Kuat			
Komposit			14	89			79 Risiko Terkendali
Status			Sedang	Kuat			

BLU Maturity Rating



BLU Maturity Rating merupakan instrumen untuk menilai tingkat maturitas BLU, yakni tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik. Selain menunjukkan level kematangan, BLU Maturity Rating dapat mengidentifikasi *area for improvement* sehingga BLU bisa meningkatkan layanan bagi masyarakat.

Penilaian dalam BLU Maturity Rating dibagi dalam dua kelompok, yakni penilaian berbasis hasil dan penilaian berbasis proses.

Penilaian berbasis hasil merupakan penilaian atas kemampuan BLU mencapai target, baik target keuangan maupun pelayanan. Sedangkan, penilaian berbasis proses merupakan penilaian atas tingkat kedalaman proses BLU, yang meliputi aspek kapabilitas internal, aspek tata kelola dan kepemimpinan, aspek inovasi, dan aspek lingkungan.

Hasil *self-assessment* tahun 2021, tingkat maturitas PIP mencapai level 3,8 dari level 5 sebagai level maksimal. Ini berarti, tingkat kematangan manajemen PIP dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola sangatlah bagus. Seluruh aktivitas PIP dalam mencapai kinerja 2021 telah dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan dan sedang menuju organisasi yang mampu mendefinisikan, mengendalikan, serta memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun hasil yang diberikan kepada publik.

Dalam hal kinerja keuangan, PIP mampu mencapai tingkat maturitas 4,4. Ini menunjukkan tingkat kesehatan keuangan PIP sangat bagus. Tidak hanya memiliki likuiditas yang tinggi dan mandiri, PIP secara efektif dan efisien memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Dalam hal pelayanan, BLU PIP meraih tingkat maturitas sempurna di angka 5. Ini berarti, PIP mampu memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan indeks layanan yang ditargetkan, mampu mengantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan, mampu menindaklanjuti laporan pengaduan dan keluhan secara tepat, baik dari sisi tindak lanjut maupun waktu penyelesaian, serta berhasil dalam pemenuhan layanan sesuai dengan target organisasi.

Adapun, *area for improvement* yang menjadi masukan, mencakup aspek manajemen perubahan serta manajemen lingkungan dan penggunaan sumber daya. Dalam hal manajemen perubahan, area yang dapat diperbaiki adalah terkait prosedur formal agar manajemen perubahan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam hal manajemen lingkungan, PIP perlu mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal terkait pengelolaan *environmental footprint* serta penggunaan sumber daya dengan memperhatikan isu lingkungan terkini.





Anti-korupsi



Kampanye media pengendalian gratifikasi

Kampanye bertujuan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan PIP. Kampanye dilakukan melalui media cetak (*banner*) dan media sosial Instagram.



Pembentukan tim kerja mini akselerasi pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, tim kerja mini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah nomor KEP-34/IP/2021.



Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

Pencanangan Zona Integritas pada PIP merupakan bagian dari komitmen PIP menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Diselenggarakan pada 17 Desember 2021 di Bandung, Direktur Utama PIP menandatangani piagam pencanangan Pembangunan Zona Integritas, disaksikan oleh Direktur Utama PT. Bahana Artha Ventura, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.



Laporan Manajemen



Aceng Sutiana (44 tahun), nasabah UMi,
tukang pangkas rambut di daerah Kabupaten
Bogor (18 Maret 2022).



Laporan Dewan Pengawas

Pembukaan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, mohon kiranya kami selaku Dewan Pengawas dapat memberikan laporan kinerja tahun 2021 sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan PMK Nomor 91/PMK.05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Para pembaca Laporan Tahunan PIP 2021,

Sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan PMK Nomor 91/PMK.05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pusat Investasi Pemerintah, serta memberikan nasihat kepada Pusat Investasi Pemerintah. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PIP.

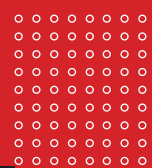
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas antara lain mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada PIP mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh PIP; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Keuangan;

Laporan Dewan Pengawas merupakan implementasi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas PIP yang dilakukan untuk perbaikan dan mengarahkan pengelolaan PIP berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Astera Primanto Bhakti

Ketua Dewan Pengawas



Kinerja Penyaluran dan Kinerja Keuangan

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi selama tahun 2021 mempengaruhi capaian kinerja PIP, baik terkait tugas utama PIP dalam menyalurkan Pembiayaan UMi maupun terkait pengelolaan dana yang dikelola sebagai amanah yang diberikan negara kepada PIP.

Berlakunya PMK Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU telah mengubah arah tata kelola dan membawa perubahan mendasar tentang bagaimana PIP menjalankan praktik bisnis yang sehat, yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan penyaluran pendanaan UMi yang bermutu dan berkesinambungan.

Dari aspek kinerja layanan penyaluran, maka selama tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan perhatian khusus. PIP harus lebih fokus dalam mendorong kegiatan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi melalui peningkatan jumlah LKBB/koperasi/lembaga keuangan mikro sebagai penyalur dan *linkage*, perluasan penyaluran pembiayaan ke debitur UMi berbasis syariah, dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi). Sementara program kerjasama *leveraging asset* atas piutang Pembiayaan UMi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) merupakan program yang baik, namun demikian belum *feasible* untuk dilakukan saat ini. Pandemi Covid-19 masih menjadi kendala utama tidak tercapainya target-target kegiatan tersebut disamping juga permasalahan dari *stakeholder* atau internal pemerintah daerah yang tentu saja diluar jangkauan PIP.

Dari aspek kinerja keuangan, berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021, pendapatan PIP tahun 2021 secara nominal terdapat penurunan, Secara nominal pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu dari Rp375.710.456.259 pada tahun 2020 menjadi Rp309.765.275.158. Namun demikian, capaian tersebut sudah melebihi target pendapatan, yaitu sudah mencapai 103,06 persen dari anggaran yang ditetapkan. Bahkan untuk pendapatan PIP yang bersumber dari pendapatan PIP lainnya yang berhasil membukukan realisasi sebesar 135,18 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, dari sisi belanja, berdasarkan dokumen LRA, maka belanja PIP selama tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 86,17 persen, atau secara nominal jumlah realisasi belanja sebesar Rp61.536.229.047 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 71.411.323.000. Realisasi tersebut terdiri dari belanja barang dan belanja modal, dimana belanja barang mendominasi yaitu sebesar Rp60.398.267.047.



Susunan Dewan Pengawas

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dimaksud, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/2018 telah ditetapkan susunan Dewan Pengawas, sebagai berikut:

No	Dewan Pengawas	Jabatan
1.	Drs. Astera Primanto Bhakti, MTax	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr.Ir. Andi Zaenal Abidin Dulung, Mconst. Mgt, M.Sc	Anggota
3.	Ir. Yuana Sutyowati Barnas, MM	Anggota
4.	Ubaidi Socheh Hamidi, SE, MM	Anggota

Rencana Strategi Bisnis & Rencana Bisnis dan Anggaran

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Berkenaan dengan evaluasi Rencana Strategis Bisnis (RSB), Dewan Pengawas berpendapat dari sisi format RSB BLU yang berlaku saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020. Kebutuhan dan urgensi atas revisi RSB tergantung sejauh mana RSB saat ini secara substansi masih mengakomodasi format yang diatur dalam PMK.

Terkait dengan Implementasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Tahun 2021, RBA telah mengalami revisi. Latar belakang revisi tersebut adalah karena perubahan target capaian jumlah debitur sebanyak 1.800.000 debitur atau secara akumulatif menjadi 5.200.000 di akhir tahun. Untuk target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar Rp300.576.616.000 dan penambahan pagu belanja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, dari pagu semula Rp52.930.079.000 menjadi Rp78.834.904.000.

Dewan Pengawas melihat perlunya dilakukan evaluasi penyaluran dengan memperhatikan prinsip layanan keterbukaan dan mempertimbangkan data kemiskinan dan memperhatikan pemerataan penyaluran di luar Pulau Jawa. Atas rekomendasi tersebut, Direksi PIP sudah memberikan respons dan tindak lanjut. Respons dari Direksi dilakukan dengan menempatkan target peningkatan jangkauan pelayanan pada dokumen RBA.

Hal ini sejalan dengan misi PIP untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan UMi sehingga semakin banyak pelaku usaha ultra mikro yang terfasilitasi, maka PIP harus melakukan perluasan penyaluran pembiayaan UMi. Sampai dengan tahun 2021, sebaran penyaluran Pembiayaan UMi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 72 persen dari akumulasi penyaluran, disusul Pulau Sumatra dengan sekitar 17 persen, dan sisanya sekitar 11 persen tersebar di wilayah lainnya. Dengan demikian, masih sangat terbuka lebar peluang perluasan jangkauan penyaluran UMi khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerataan penyaluran di luar Pulau Jawa juga sangat penting dalam mendukung upaya Pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam indikator *Gini Ratio*.

Dalam dokumen RBA, diungkapkan beberapa strategi untuk memperluas jangkauan penyaluran, antara lain:

- Perubahan kebijakan tarif, yaitu pemberian tarif yang lebih murah untuk penyaluran yang dilakukan di luar Pulau Jawa, penyaluran di sektor prioritas misalnya sektor pertanian, dan/atau penyaluran melalui koperasi di luar Pulau Jawa.
- Penambahan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Penjajakan penyaluran pembiayaan melalui lembaga *financial technology (fintech)* atau *peer-to-peer (P2P)* lending untuk segmen sektoral/regional.



Penjajakan *Direct lending*

Dewan Pengawas mencatat masih perlunya pelaksanaan perluasan jangkauan penyaluran Pembiayaan UMi untuk daerah di luar Pulau Jawa. Di samping itu, Direksi PIP telah melakukan langkah-langkah nyata untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan *direct lending*.

Sebagai tindak lanjut penjajakan *direct lending* sebagai model bisnis baru PIP dalam Pembiayaan UMi, direksi PIP telah melakukan beberapa Langkah, sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim dan Izin kepada Pembina Teknis, dengan rincian tindakan:
 1. Pembentukan Tim Teknis di PIP
 2. Izin untuk melakukan benchmarking dan kajian *direct lending*.
 3. Persetujuan Pembina Teknis (Dit. SMI) untuk melakukan *benchmarking* dan kajian *direct lending*.
 4. *Secondment* Pegawai PIP ke PT PNM yang dilakukan dalam di berbagai wilayah dan berbagai tempat.
- b. Diskusi awal dengan UKM Center UI, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi masyarakat daerah dalam menerima pinjaman, bagaimana menyiapkan infrastruktur pendampingan sebagai *key success factor*, perlakuan pencatatan dan penyelesaian jika terjadi *non-performing loan* (NPL), penyempurnaan regulasi pendukung, dan struktur organisasi yang memadai pelaksanaan *direct lending*.
- c. Rencana selanjutnya *benchmarking* dengan perbankan, *fintech*, dan penunjukan konsultan, target kajian adalah persepsi masyarakat dalam menerima pinjaman, pola pendampingan dan struktur organisasi. Terkait dengan progres tindak lanjut *direct lending* sebagai rencana model bisnis baru PIP dalam Pembiayaan UMi, Dewan Pengawas berpendapat bahwa jadi atau tidaknya *direct lending* adalah masalah kedua, yang penting adalah PIP telah melakukan proses pembelajaran sehingga mengetahui dan memahami bagaimana menyalurkan *end to end user*.

Tata Kelola Pemerintahan

Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Dewan Pengawas memberikan apresiasi yang cukup baik kepada PIP yang telah melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi yang cukup baik.

Pusat Investasi Pemerintah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas audit Laporan Keuangan selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun anggaran 2019 dan 2020.

Dari hasil evaluasi maturitas yang dilakukan oleh pembina teknis, yakni Direktorat Sistem Manajemen Investasi-DJPB, PIP mendapatkan predikat penilaian “baik”, dibandingkan predikat sebelumnya yakni “cukup”. Unsur penilaian meliputi aspek teknik administrasi (organisasi dan tata laksana, kepatuhan internal, umum dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan SDM, dan pengelolaan keuangan) dan aspek layanan utama (pengelolaan dan layanan BLU serta *maturity rating*).

Dalam proses membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, PIP telah melakukan sejumlah langkah nyata, antara lain membentuk Tim Kerja Mini Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada PIP.

Saran dan Masukan

Para pembaca Laporan Tahunan PIP 2021,

Berkenaan dengan mulai munculnya persoalan NPL yang telah mengakibatkan munculnya Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional Tahun 2021, Dewan Pengawas merekomendasikan agar dibuat rencana aksi (*action plan*) untuk melakukan koordinasi dengan para pihak, terutama dengan para penyalur, melakukan inventarisasi permasalahan yang menjadi penyebab persoalan tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik, Dewan Pengawas mendorong agar Direksi dapat menyampaikan secara berkala, sekurang kurangnya terkait Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Pengelolaan/Penyaluran, Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU. Selain itu, dalam pelaksanaan agenda-agenda pengelolaan BLU, Direksi juga perlu memperhatikan limitasi waktu penyelesaian apabila memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.

Atas Nama Dewan Pengawas,



Astera Primanto Bhakti

Laporan Direksi

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya PIP dapat terus bekerja dan berkarya dalam mengelola program dukungan Pembiayaan serta program-program dukungan lainnya bagi para pelaku usaha ultra mikro. Program kerja PIP juga ditujukan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Memasuki tahun kelima sejak PIP pertama kali menyalurkan pembiayaan UMi di tahun 2017, kita semua masih dihadapkan pada kondisi pandemi yang menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Terutama dengan merebaknya beberapa varian COVID-19 yang puncaknya adalah varian Delta yang menyebabkan Pemerintah di berbagai negara menerapkan *lockdown* dan pembatasan sosial skala besar untuk menekan penyebaran varian Delta.

Di Indonesia, penerapan PPKM level tertinggi di beberapa wilayah tentu mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat turun, tak terkecuali sektor usaha ultra mikro. Kondisi penuh tantangan tersebut memacu PIP untuk terus bekerja keras memberikan berbagai dukungan bagi para pelaku usaha ultra mikro agar bisa terus melanjutkan usahanya.

Dalam laporan tahunan Tahun 2021 ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pengelolaan PIP, antara lain terkait analisis kinerja, analisis prospek usaha, kebijakan strategis, kendala yang dihadapi dan langkah penyelesaian, serta perkembangan penerapan tata kelola.

A. Analisis Kinerja

Penyaluran Pembiayaan UMi pada periode triwulan I tahun 2021 sudah menunjukkan tren yang baik meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi bulan Januari dan Februari 2020 ketika pandemi Covid-19 belum merebak. Hal tersebut sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (*y-on-y*).

Kinerja penyaluran Pembiayaan UMi menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada triwulan II, bertepatan dengan periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana permintaan pembiayaan pada umumnya mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode triwulan II tahun 2020, penyaluran di triwulan II tahun 2021 menunjukkan kenaikan yang signifikan, dari sekitar 384.000 debitur di triwulan II tahun 2020 menjadi 858.000 debitur di triwulan II tahun 2021 atau naik 123 persen. Capaian ini sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menuju fase pemulihan, di mana ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 tumbuh 7,07 persen (*y-on-y*) atau pertumbuhan tertinggi setelah resesi tahun 2020.

Capaian penyaluran yang sangat baik di triwulan II tahun 2021 dengan sangat terpaksa harus mengalami tekanan di triwulan III karena, pada awal Juli 2021, masuk Covid-19 varian Delta, yang menurut Kementerian Kesehatan enam kali lebih menular daripada varian Alpha B.1.1.7 asal Inggris. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai bulan Juli dan terus mengalami perpanjangan disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut sangat memengaruhi penyaluran Pembiayaan UMi sehingga penyaluran pada triwulan III tahun 2021 jauh

Ririn Kadariyah

Direktur Utama PIP

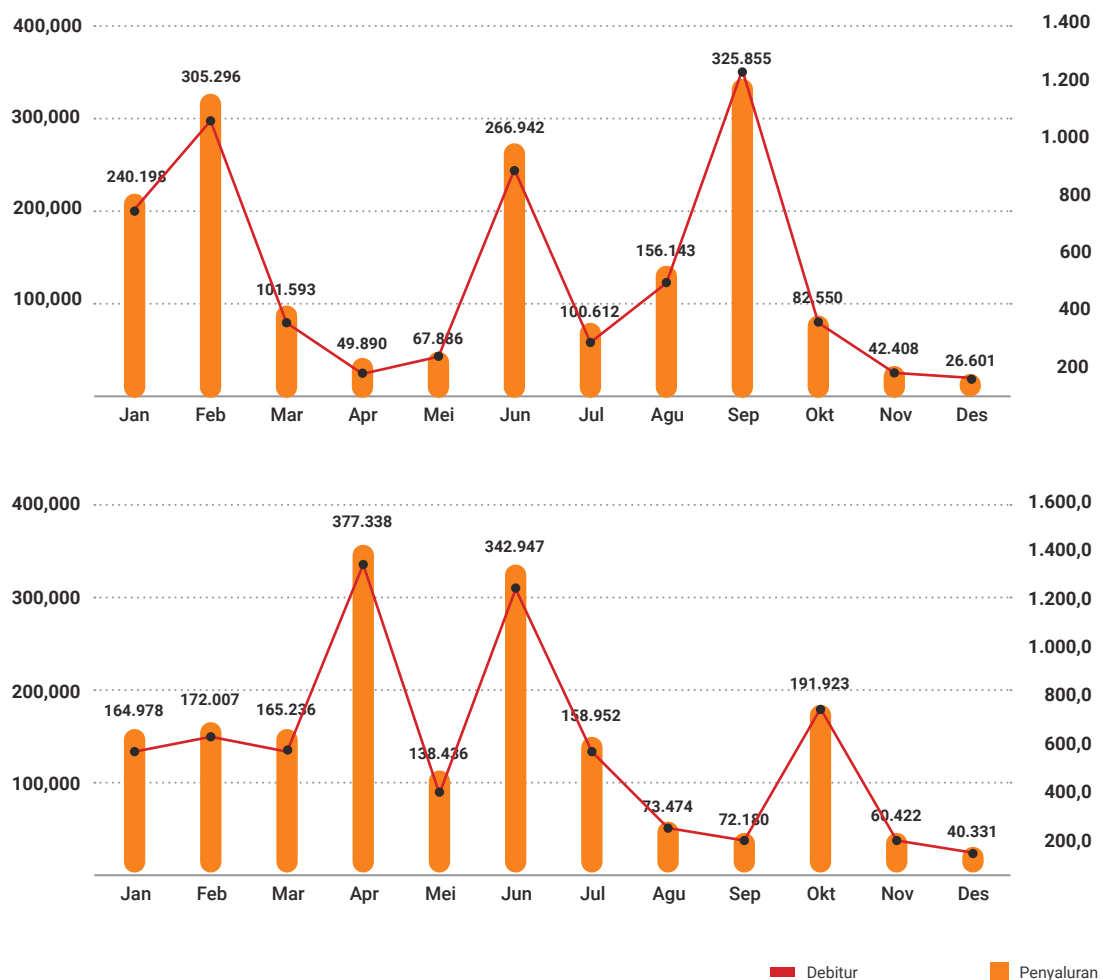


lebih rendah dibandingkan triwulan III tahun 2020 dan hampir 180 derajat berkebalikan dengan kondisi di triwulan II. Penyaluran Pembiayaan UMi di triwulan III tahun 2021 hanya mencapai 304.000 debitur dibandingkan penyaluran di triwulan III tahun 2020 yang mencapai 858.000 debitur atau terkontraksi 65 persen.

Kinerja penyaluran di triwulan IV tahun 2021 menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dari capaian triwulan IV tahun 2020. Pembiayaan UMi disalurkan kepada 292.000 debitur dibandingkan dengan 151.000 debitur di triwulan IV tahun 2020 atau naik 93 persen. Sebagian besar capaian di triwulan IV disumbangkan di bulan Oktober 2021 dengan capaian 191.000 debitur.

Tahun 2021 juga masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para lembaga *linkage* penyalur Pembiayaan UMi. Bagi lembaga *linkage* yang bisa menjaga kinerja keuangannya di masa pandemi, khususnya di tahun 2020, maka peluang untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi di tahun 2021 makin terbuka lebar. Namun demikian, bagi lembaga *linkage* yang tidak mampu mempertahankan kinerja di tahun 2020, kinerja di tahun 2021 juga makin menunjukkan pelemahan. Hal ini tercermin dari NPL Pembiayaan PIP yang menunjukkan kenaikan menjadi 0,25 persen di akhir 2021, dari sebelumnya sebesar 0,03 persen di akhir 2020.

Kinerja Penyaluran Pembiayaan UMi Tahun 2020 dan 2021



B. Analisis prospek usaha

Meskipun kondisi pandemi masih mempengaruhi keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro serta kinerja Penyalur, kami yakin bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan dampak pandemi, baik dari sisi protokol kesehatan maupun dari sisi pemulihan ekonomi nasional, akan terus mendukung peningkatan dan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi di tahun mendatang. Beberapa faktor spesifik yang mendukung peluang perluasan penyaluran pembiayaan UMi, antara lain:

1. Tahun 2021 ditutup dengan penambahan delapan LKBB non afiliasi Pemerintah sebagai penyalur baru Pembiayaan UMi. Dari delapan LKBB dimaksud, baru terdapat tiga LKBB yang sudah melakukan penyaluran. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan penyaluran dari lima penyalur baru yang akan mulai melakukan penyaluran di tahun 2022. Selain itu, PIP menargetkan penambahan LKBB non-afiliasi pemerintah sebanyak 20 LKBB di tahun 2022, yang akan dapat mendorong perluasan penyaluran Pembiayaan UMi lebih jauh lagi.
2. Penerapan tarif layanan dengan rentang tarif juga akan mendorong penurunan suku bunga atau margin produk Pembiayaan UMi kepada debitur sehingga produk Pembiayaan UMi diharapkan akan semakin terjangkau bagi para pelaku usaha ultra mikro dibandingkan dengan Pembiayaan sejenis di LKBB lainnya.
3. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja yang memungkinkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi badan hukum sudah terbit, sehingga peluang bagi BUMDes untuk dapat menjadi penyalur Pembiayaan UMi makin terbuka. Tantangan yang saat ini masih muncul adalah memastikan kinerja dan tata kelola BUMDes dapat memenuhi persyaratan sebagai penyalur Pembiayaan UMi.
4. Di akhir tahun 2021, PIP juga telah berhasil melakukan kerja sama dengan PT. Mekar Investama selaku pengelola *platform fintech Mekar.id* sehingga, di tahun 2022, PIP akan memiliki portfolio penyaluran melalui LKBB yang memanfaatkan *platform fintech*.
5. Melalui perencanaan, strategi bisnis, dan mitigasi risiko yang tepat, Direksi memiliki keyakinan bahwa peluang-peluang tersebut akan dapat direspons dengan baik dan akan berdampak positif terhadap prospek dan kinerja PIP ke depan.

C. Kebijakan strategis

Beberapa kebijakan bersifat strategis telah diambil oleh Direksi selama tahun 2021, antara lain:

1. Kebijakan terkait Respons terhadap pandemi

Beberapa kebijakan dari PIP dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, antara lain:

a) Kebijakan sebagai dukungan bagi pelaku usaha ultra mikro:

- i. Program dukungan terintegrasi melalui kampanye “Bersama Sahabat – UMi Bangkit” yang memberikan berbagai dukungan bagi keberlangsungan dan peningkatan usaha, antara lain:
 - a. Pelatihan dan pendampingan UMi Siap *Online* yang memberikan solusi bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk dapat melakukan pemasaran produknya secara daring, baik melalui media sosial maupun *marketplace*.
 - b. Dengan adanya kerjasama dengan Grab Indonesia, memberikan akses bagi debitur UMi dalam rangka digitalisasi usaha ultra mikro melalui pengenalan dan pendaftaran usaha ke platform Grab dengan tarif layanan yang lebih rendah dari pelaku usaha lain. Serta mendapatkan pelatihan dan pendampingan pemasaran produk dalam kerangka pemberdayaan dan pengembangan usaha ultra mikro.
 - c. Lelang *Online* produk unggulan UMi sebagai alternatif kanal pemasaran debitur Pembiayaan UMi bekerja sama dengan Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

- d. Inkubasi usaha bagi debitur Pembiayaan UMi bekerja sama dengan Pusat Inkubator Bisnis Oorange Universitas Padjajaran untuk 35 debitur di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung Barat serta Badan Inkubator dan Inovasi Wirausaha Universitas Brawijaya untuk 25 debitur di Kota Malang.
- e. Fasilitasi wadah usaha debitur Pembiayaan UMi sebagai hasil kerja sama PIP dengan Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. *Piloting* dilaksanakan di Kota Ternate, Maluku Utara, dengan nama Rumah UMi.
- ii. Fasilitasi bagi pelaku usaha untuk dapat memperoleh program stimulus PEN, yaitu program subsidi bunga/margin. Untuk subsidi tahun 2021, PIP telah membantu pemrosesan tagihan subsidi bunga/margin kepada Kemenkop UKM senilai Rp 3,66 miliar.

b) Kebijakan sebagai dukungan untuk penyalur pembiayaan UMi

- i. Pemberian masa tenggang pembayaran pokok selama enam bulan untuk seluruh akad Pembiayaan dengan Penyalur. Hal ini dimaksudkan agar Penyalur dapat mengoptimalkan penyaluran Pembiayaan UMi sekaligus untuk membantu *cash flow* Penyalur sebagai bagian penyehatan kinerja penyalur khususnya di masa pandemi.
- ii. Fasilitasi bagi Penyalur dalam mengakses program stimulus Pemerintah, antara lain membantu penyampaian tagihan subsidi bunga PEN ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk tagihan subsidi bunga/margin tahun 2021, PIP telah memfasilitasi tagihan subsidi dari delapan koperasi *linkage*.

2. Kebijakan perluasan dan pemerataan penyaluran

Dalam rangka memperluas pembiayaan UMi, PIP menerapkan beberapa kebijakan:

- a) Fasilitasi LKBB non afiliasi Pemerintah sebagai penyalur
Di tahun 2021 terdapat 8 LKBB non afiliasi pemerintah sebagai penyalur baru Pembiayaan UMi. Dengan demikian, jumlah Penyalur dan *Linkage* Pembiayaan UMi telah mencapai 55 lembaga.
- b) Kebijakan tarif layanan
Tarif layanan dengan skema baru memungkinkan Penyalur yang memiliki produk Pembiayaan UMi dengan suku bunga/margin yang rendah atau menyalurkan Pembiayaan dengan tujuan afirmasi tertentu untuk mendapatkan tarif layanan dari PIP yang juga lebih rendah.

3. Standardisasi Pendampingan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan di mana program pendampingan selangkahnya dapat menjaga kelancaran membayar, keajegan berusaha, dan meningkatkan kapasitas debitur UMi, maka dirasakan perlu untuk menyempurnakan regulasi yang sudah ada saat ini, yaitu Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor 6/IP/2019 tentang Mekanisme Pendampingan Debitur, dengan regulasi baru yang menjadi pedoman para Penyalur Pembiayaan UMi dalam melaksanakan program pendampingan secara tepat dan memadai.

Standardisasi pendampingan untuk memudahkan penyalur/*linkage* dalam perencanaan pendampingan, implementasi di lapangan, evaluasi kegiatan, serta penyusunan laporan dan rekomendasi kegiatan pendampingan kepada PIP sehingga lebih terukur dan terarah. Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Utama PIP Nomor PER-09/IP/2021 tentang Pedoman Pendampingan Pembiayaan Ultra Mikro, diatur lebih jelas mengenai bentuk dan prosedur pendampingan.

Yang tidak kalah penting adalah diaturnya tentang pengelolaan pendamping atau *account officer* (AO) itu sendiri. Pengelolaan pendamping mensyaratkan kompetensi pendamping yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Hal ini bertujuan agar pendamping mampu memberikan hasil (*output* dan *outcome*) sesuai tujuan kegiatan pendampingan, seperti kemampuan menghadapi masalah dan memperoleh solusi, hingga mitigasi risiko pembiayaan.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola

PIP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola, baik dari sisi tata kelola PIP sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum maupun dari sisi tata kelola program Pembiayaan UMi. Untuk itu, PIP mengoptimalkan peran Satuan Pemeriksaan Intern sebagai lapis pertama dalam memastikan kebijakan berikut implementasinya telah sesuai dengan peraturan. Selain itu, PIP bersinergi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan untuk mengawal kebijakan dan implementasi kebijakan PIP agar tetap sesuai dengan peraturan dan selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Pemerintah secara lebih luas.

Sistem Pengendalian Risiko Bisnis (SPRB) juga disusun oleh PIP dalam rangka membangun tata kelola yang baik agar bisa mengembangkan bisnis Pembiayaan UMi dengan risiko yang terkendali dan mitigasi yang memadai. SPRB tersebut telah ditetapkan PIP dalam Keputusan Direktur Utama PIP nomor KEP-35/IP/2021 tentang Sistem Pengendalian Risiko Bisnis di Lingkungan Pusat Investasi Pemerintah

Dari sisi eksternal Kementerian Keuangan, PIP juga mendapatkan arahan, dukungan, dan pendampingan dari Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI, antara lain melalui Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, serta Sosialisasi dan Pelatihan, agar program Pembiayaan UMi dapat lebih berhasil menjangkau semakin banyak pelaku usaha ultra mikro di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Laporan Keuangan PIP diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan opini Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, opini laporan keuangan PIP dinyatakan wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLU PIP tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Penutup

Direksi menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang tulus atas arahan perhatian, dan dukungan dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Komisi XI DPR RI, Komite IV DPD RI, Dirjen Perbendaharaan dan Para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Dewan Pengawas, Direktur Sistem Manajemen Investasi, dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, serta dukungan dan kerja sama dari Lembaga Penyalur Pembiayaan UMi, BLU dan BUMN SMV Kementerian Keuangan, mitra Pemerintah Daerah/ Kementerian/Lembaga, mitra organisasi swasta dan Universitas, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN, seluruh pemangku kepentingan, serta seluruh jajaran PIP sehingga kita semua dapat bersinergi dan bekerja bersama untuk melaksanakan misi pemberdayaan usaha ultra mikro.

Direksi mengucapkan puji syukur sehingga PIP mampu memenuhi target kinerja di tahun 2021 dan berharap agar kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

PIP berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan serta terus melakukan sinergi dalam pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Atas nama Direksi,



Ririn Kadariyah

Direktur Utama PIP





Profil PIP

Informasi Umum & Identitas PIP

PIP merupakan satuan kerja di Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tugas PIP melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saat ini, pembiayaan usaha mikro difokuskan pada kelompok ultra mikro dengan pembiayaan maksimal Rp20 juta.

PIP dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu, PIP didukung oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Misi

1

Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang *prudent*, efisien, dan efektif;

2

Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;

Visi

Menjadi koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel

3

Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang andal, profesional dan modern;

4

Melakukan kerja sama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya;

5

Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima Pembiayaan Ultra Mikro.

Riwayat Singkat PIP

PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Semula, status PIP melekat pada Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah (SKS-BIP). Setelah kinerja meningkat, Menteri Keuangan menetapkan status PIP menjadi Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh pada 27 Maret 2009.

Pada saat didirikan, bisnis inti PIP adalah penyediaan sarana infrastruktur. Namun, seiring dengan penggabungan mandat penyediaan infrastruktur ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maka seluruh aset PIP menjadi Penyertaan Modal Negara pada PT SMI di tahun 2015. Selanjutnya, Menteri Keuangan pada Juli 2017 merevitalisasi tugas dan fungsi PIP sebagai *coordinated fund* untuk menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ini PIP beroperasi berdasarkan PMK 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Brand PIP

Nama	Pusat Investasi Pemerintah
Nama Singkat	PIP
Bidang usaha	Pengelolaan Dana Bergulir yang difokuskan pada kelompok ultra mikro dengan pembiayaan maksimal Rp20 juta.
Tanggal Pembentukan	5 Juli 2017
Dasar Pembentukan	Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Dana Kelolaan (s.d. tahun 2021)	Rp10 triliun
Jumlah Penyalur dan Linkage	10 LKBB penyalur langsung 1 LKBB penyalur tidak langsung 44 lembaga <i>linkage</i>
Jumlah Pegawai	Per Desember 2021 sebanyak 41 pegawai
Alamat Organisasi	Graha MR21 lantai 8 Jl.Menteng Raya No.21, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. 10340. Telp: 62-21 3924822
Situs web	pip.kemenkeu.go.id
Contact Center	https://salam-pip.kemenkeu.go.id Email: salam.pip@kemenkeu.go.id



Call Center
021 3924547



Instagram
[@pusatinvestasipemerintah](https://www.instagram.com/pusatinvestasipemerintah)



Pengaduan
pengaduan.pip@kemenkeu.go.id



Facebook
<https://www.facebook.com/kemenkeu.pip>



Email Address
Email: sekre.pip@kemenkeu.go.id



Youtube
Pusat Investasi Pemerintah

Makna Logo PIP



Logo PIP

Tulisan PIP menyerupai tunas bunga yang melambangkan harapan dan usaha terbaik mengangkat pelaku usaha ultra mikro (UMi) untuk naik kelas dari sisi kualitas bisnis dan kelangsungan hidup. Sebuah simbol yang mewakili kerja keras, komitmen, dan memberikan manfaat bagi orang lain.

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

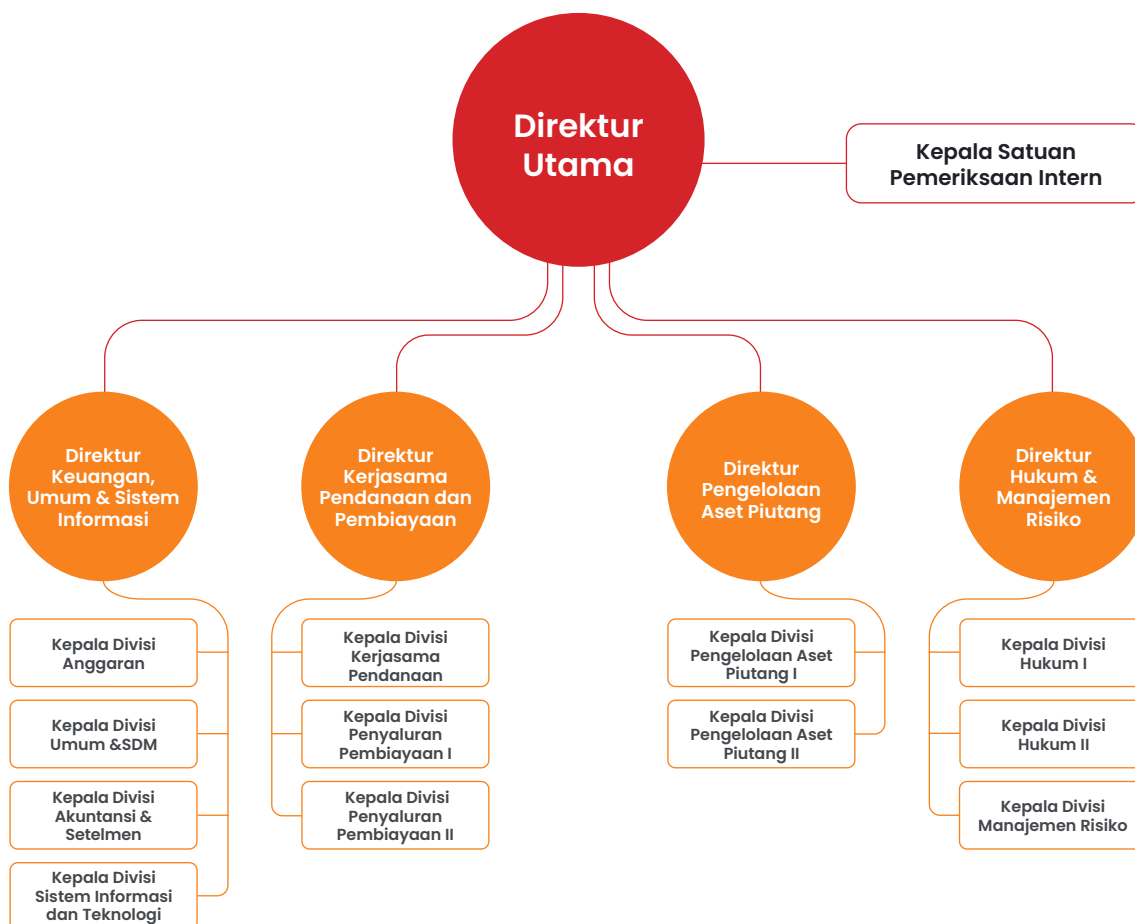
Bentuk logo dengan huruf kapital

Penggunaan huruf kapital menandakan ketegasan dan komitmen pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam mengangkat ekonomi pelaku usaha UMi di Indonesia.

Huruf biru tua

Melambangkan rasa tenang, menyejukkan, terbuka, inspiratif, stabil, dan dapat diandalkan. Menyimbolkan profesionalisme, komitmen membangun, dan andal serta dapat dipercaya.

Struktur Organisasi



Regulasi PIP & Pembiayaan UMi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah tanggal 5 Juli 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, tanggal 10 Desember 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan tanggal 14 Januari 2021.



Profil Dewan Pengawas

Nama

**Astera
Primanto
Bhakti**

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 20 Januari 1968

Jabatan

Ketua merangkap Anggota
Dewan Pengawas



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen di Universitas Soedirman pada tahun 1990
- Melanjutkan dan menyelesaikan studi *Master of Taxation* di University of Denver pada tahun 1997

Pengalaman Kerja

- Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (2012-2015)
- Wakil Pemerintah Indonesia di *Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTEI) for Tax Purposes* (2013-2015)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara (2015-2017)
- Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (2015-2020)
- Wakil Indonesia pada *Eminent Expert Group on Tax Policy and Public Expenditure Management for Sustainable Development of The United Nations ESCAP* (2016-2018)
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2017-2018)
- *Caretaker* & Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (2017-2018)
- Ketua Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) (2017-2018)
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2018-sekarang)

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-330 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018

Nama

**Ubaidi Socheh
Hamidi**

Tempat, Tanggal Lahir

Klaten, 11 Desember 1969

Jabatan

Anggota Dewan Pengawas

**Riwayat Pendidikan**

- Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1994,
- Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta tahun 2006.

Pengalaman Kerja

- Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus. (2006-2013)
- Kasubdit Evaluasi Dana Desentralisasi (2013 – 2016)
- Kasubdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sekaligus merangkap sebagai Plt. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan (PTNDP) (2016)
- Direktur PTNDP, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) (2016).
- Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Bepanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal (2019 - 2021)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2021 - sekarang)

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-330 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018

Nama

**Andi Z.A.
Dulung**

Tempat, Tanggal Lahir

Makassar, 23 Oktober 1961

Jabatan

Anggota Dewan Pengawas



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1986,
- Mendapatkan gelar *Master of Contruction Management*, The University of New South Wales Australia pada tahun 1991
- *Master of Science (Building)* pada tahun 2002
- Mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2007 di National University of Singapore

Pengalaman Kerja

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial - Maret 2020

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-330 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018

Nama

**Yuana
Sutyowati
Barnas**

Tempat, Tanggal Lahir

Ciamis, 30 November 1959

Jabatan

Anggota Dewan Pengawas



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor 1983
- Mendapatkan gelar Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2001

Pengalaman Kerja

- Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 2006 – 2010
- Direktur Utama SMESCO/Lembaga Layanan Pemasaran KUKM 2010 – 2015
- Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 2015 – 2017
- Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi & UKM RI 2017 – 2019

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-330 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018



Profil Direksi

(Dari kiri ke kanan)

Aris Saputro

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko

Mohd. Zeki Arifudin

Direktur Pengelolaan Aset Piutang

Ririn Kadariyah

Direktur Utama

Sochif Winarno

Direktur Keuangan, Umum
dan Sistem Informasi

Muhammad Yusuf

Direktur Kerjasama Pendanaan
dan Pembiayaan

Nama

**Ririn
Kadariyah**

Tempat, Tanggal Lahir

Bantul, 18 Juni 1972

Jabatan

Direktur Utama



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum di Universitas Gadjah Mada 1996
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada 2005

Pengalaman Kerja

- Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten periode 2008-2010
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan periode 2010-2011
- Kepala Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi periode 2011-2015
- Kepala Subdirektorat Hukum, Direktorat Sistem Manajemen Investasi periode 2015-2017
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019
- Direktur Utama PIP periode 2019 - sekarang

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-707/KMK.01/2019 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019

Nama

**Sochif
Winarno**

Tempat, Tanggal Lahir

Blitar, 9 November 1966

Jabatan

Direktur Keuangan, Umum
dan Sistem Informasi



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan DIII STAN 1989
- Menyelesaikan Pendidikan S1 Manajemen di Universitas Andalas 2001
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Manajemen Keuangan di Universitas Semarang 2007

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten 2010-2011
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus 2011-2013
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor 2013-2015
- Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat 2015-2017
- Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP 2017- sekarang

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-707/KMK.01/2019 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019

Nama

**Muhammad
Yusuf**

Tempat, Tanggal Lahir

Banjarmasin, 4 Desember 1972

Jabatan

Direktur Kerjasama Pembiayaan
dan Pendanaan



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ekonomi di STIE Yogyakarta 1997
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada 2006

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan 2009 – 2011
- Kepala Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011-2013
- Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2013-2015
- Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019
- Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP 2019 - sekarang

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-707/KMK.01/2019 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019

Nama

**Mohd. Zeki
Arifudin**

Tempat, Tanggal Lahir

Surakarta, 15 April 1972

Jabatan

Direktur Pengelolaan
Aset Piutang



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan D3 Prodip III Anggaran Tahun 1994
- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di STIA LAN Bandung 1998
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya 2005

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan 2015-2017
- Kepala Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi Direktorat Sistem Manajemen Investasi 2017-2019
- Direktur Pengelolaan Aset Piutang 2019 - sekarang

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-707/KMK.01/2019 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019

Nama

**Aris
Saputro**

Tempat, Tanggal Lahir

Magelang, 28 Agustus 1970

Jabatan

Direktur Hukum dan Manajemen
Risiko



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Manajemen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1993
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Manajemen di Universitas Mulawarman Samarinda 2010

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta periode 2010-2012
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin periode 2012 -2014
- Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Periode periode 2014 - 2017
- Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi D.I.Yogyakarta periode 2017-2019
- Direktur Hukum dan Manajemen Risiko PIP 2019 - sekarang

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-707/KMK.01/2019 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019





Laporan Keuangan

Asim (37 tahun), nasabah UMi, pembuat tampah (tampir atau nyiru), di daerah Kabupaten Bogor (18 Maret 2022).



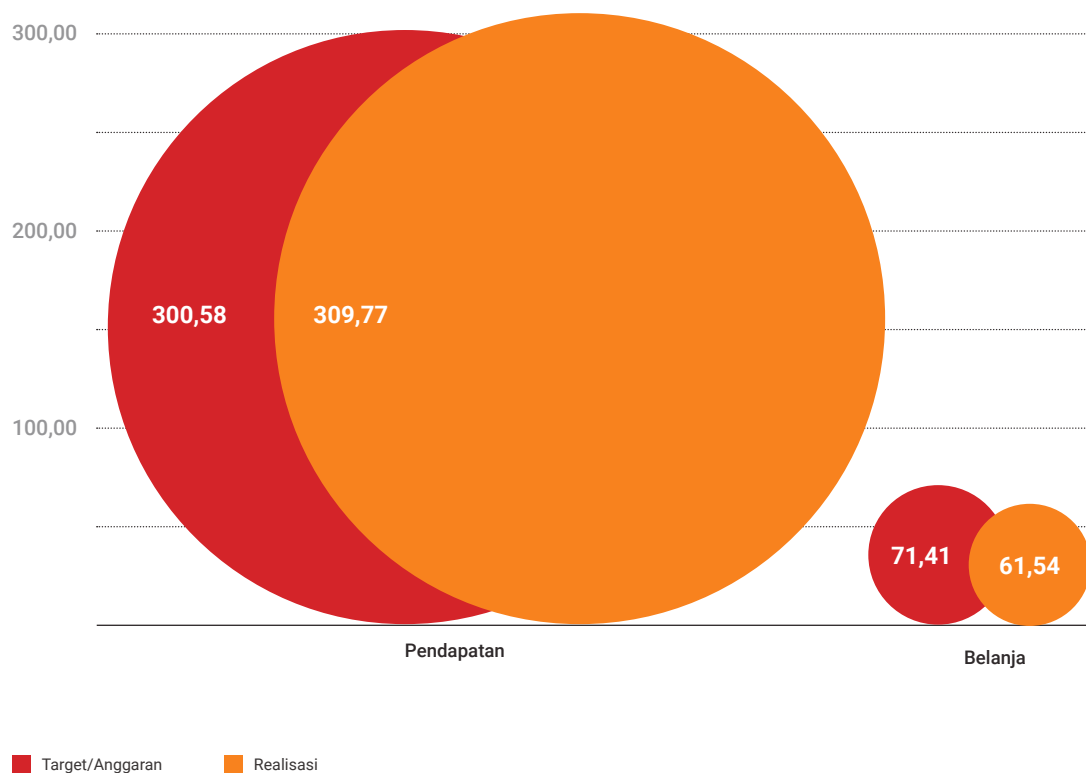
Laporan Realisasi Anggaran

Sepanjang 2021, kami membukukan realisasi pendapatan Rp309,77 miliar atau 103,06 persen lebih tinggi dari target, yang hanya sebesar Rp300,58 miliar.

Adapun, realisasi belanja mencapai Rp61,54 miliar atau 86,17% di bawah target yang sebesar Rp71,41 miliar.

Realisasi Pendapatan dan Belanja PIP Per 31 Desember 2021

(MILIAR RUPIAH)



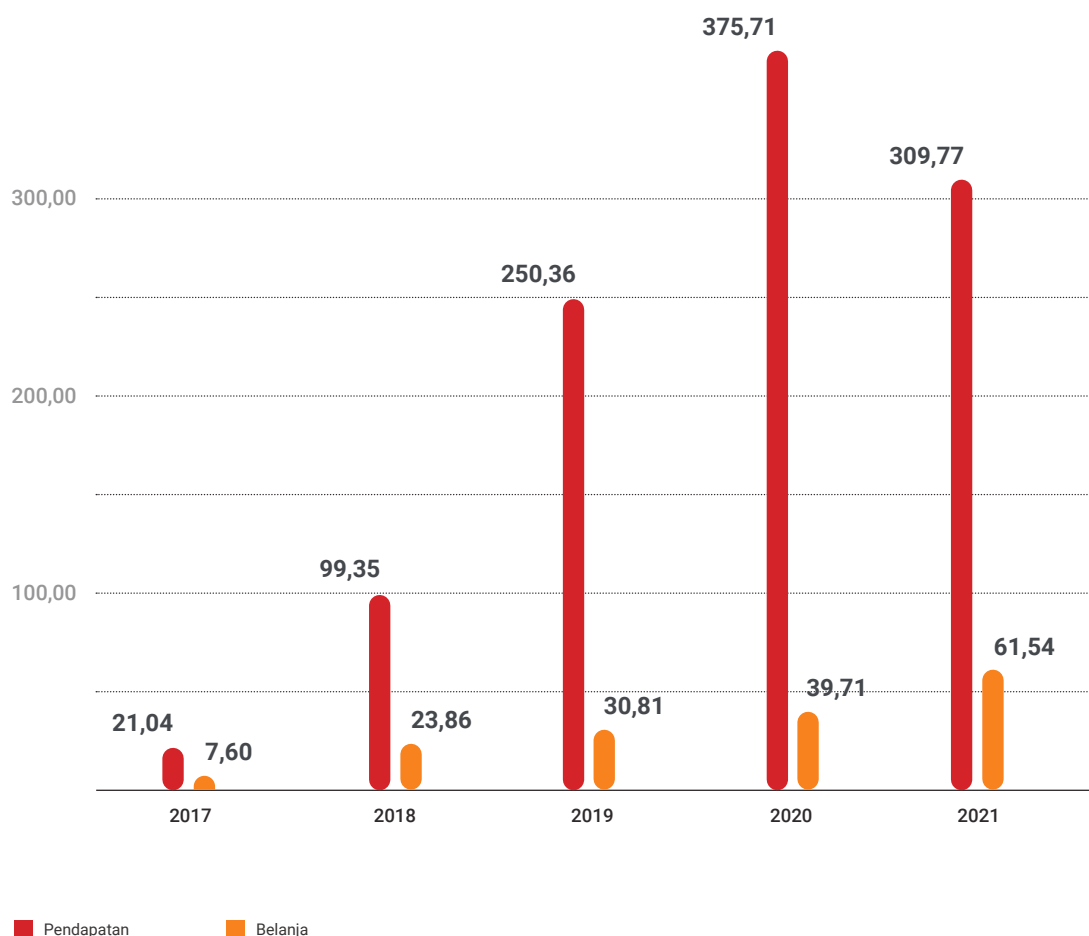
Pada tahun 2021, realisasi pendapatan lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jasa layanan investasi dan jasa layanan perbankan. Pendapatan jasa layanan investasi pada tahun 2021 mencapai Rp 182,31 miliar (naik 30,38%) dari 139,83 miliar pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan jasa layanan investasi disebabkan terdapat kenaikan pendapatan bunga dari bertambahnya piutang pembiayaan Ultra Mikro dari PIP ke Lembaga Penyalur selama tahun 2021 (dari *outstanding* di awal tahun 2021 sebesar Rp 4,56 triliun menjadi Rp 5,49 triliun pada akhir tahun 2021). Sedangkan tren penurunan suku bunga perbankan mengakibatkan turunnya pendapatan jasa layanan perbankan menjadi sebesar Rp 127,46 miliar (turun 45,99%) dari Rp 235,88 miliar pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja pada tahun 2021 mencapai Rp 61,54 miliar (naik 54,97%) dari Rp 39,71 miliar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peningkatan biaya operasional PIP akibat kenaikan target kinerja PIP pada tahun 2021 antara lain target jumlah debitur, jumlah penyalur, dan pengembangan kapasitas kewirausahaan.

Selama lima tahun operasional (2017-2021), realisasi pendapatan dan belanja PIP per tahun tergambar pada grafik berikut:

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2021

(MILIAR RUPIAH)



Laporan Operasional

Secara operasional, hingga akhir tahun 2021, kami membukukan pendapatan sebesar Rp313,51 miliar, terdiri dari realisasi pendapatan atau pendapatan yang sudah diterima sebesar Rp309,77 miliar dan tagihan atau pendapatan yang belum diterima (*receivables*) sebesar Rp3,74 miliar.

Setelah dikurangi beban sebesar Rp94,75 miliar, maka kami memperoleh surplus pendapatan pada akhir tahun 2021 sebesar Rp218,76 miliar.

Laporan Operasional

PIP Per 31 Desember 2021

(MILIAR RUPIAH)

Pendapatan:	313,51
--------------------	---------------

Realisasi pendapatan	309,77
----------------------	--------

Tagihan/pendapatan belum diterima	3,74
-----------------------------------	------

Realisasi beban:	(94,75)
-------------------------	----------------

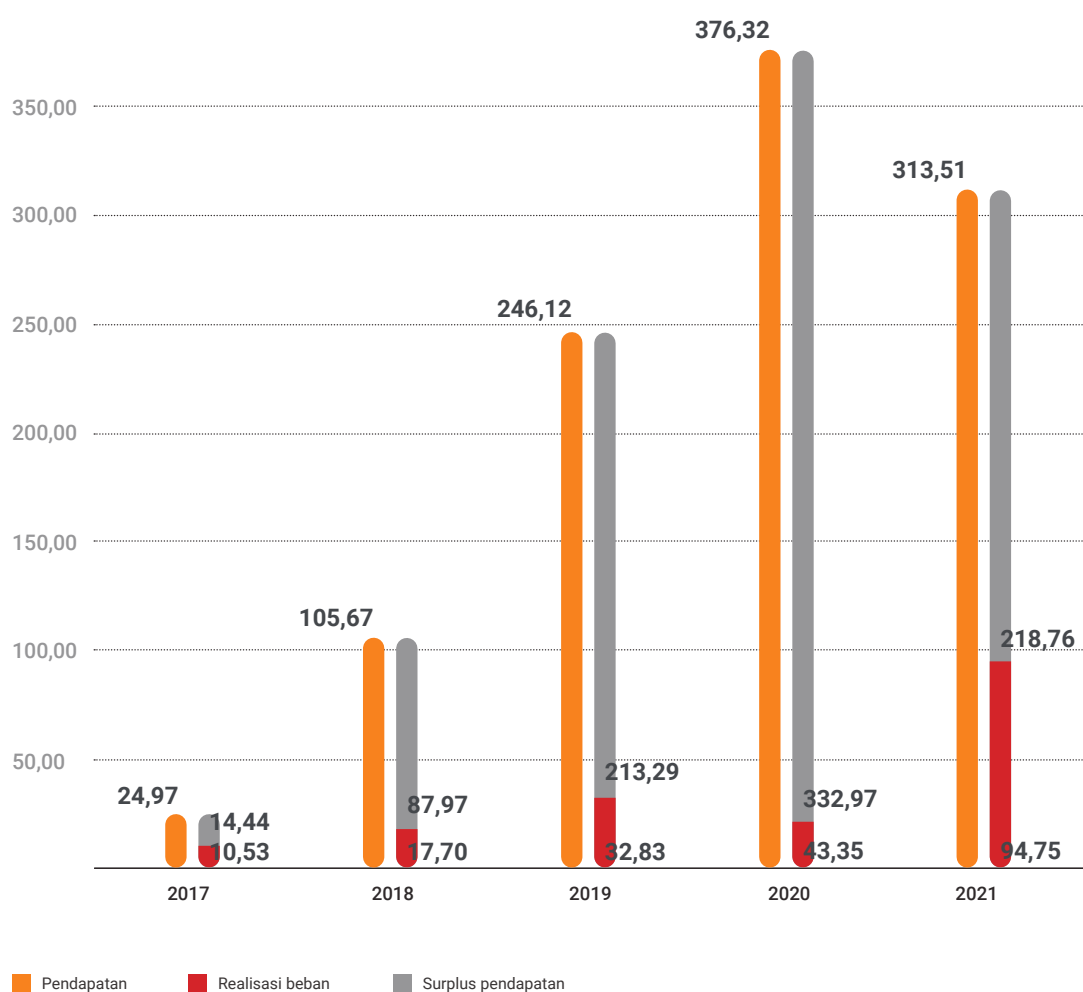
Surplus pendapatan	218,76
---------------------------	---------------

Dengan demikian, selama lima tahun operasional, kami konsisten membukukan surplus pendapatan.

Pendapatan, Beban, dan Surplus

Tahun 2017-2021

(MILIAR RUPIAH)



Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan PIP dari sisi aset, ekuitas, serta kewajiban. Pada akhir tahun 2021, kami memiliki aset sebesar Rp11.030,42 miliar. Kewajiban sebesar Rp10.000 miliar mencerminkan dana dari APBN yang diberikan pemerintah kepada PIP sebagai modal pembiayaan dana bergulir serta ekuitas sebesar Rp1.030,42 miliar.

Neraca PIP

Per 31 Desember 2021

(MILIAR RUPIAH)

Aset:		Kewajiban	10.000,00
Aset lancar	1.063,16		
Investasi jangka panjang atau dana bergulir	5.461,64		
Aset tetap (netto)	2,04	Ekuitas	1.030,42
Aset lainnya (dana kelolaan & aset tak berwujud)	4.503,58		
Total Aset	11.030,42	Total Ekuitas + Kewajiban	11.030,42



Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada awal hingga akhir tahun 2021.

Pada 1 Januari 2021, PIP memiliki saldo kas sebesar Rp4.240,61 miliar. Sepanjang tahun 2021, kas bertambah sebesar Rp1.312,28 miliar, sehingga pada akhir tahun, posisi kas tercatat sebesar Rp5.552,89 miliar.

Laporan Arus Kas PIP

Per 31 Desember 2021

(MILIAR RUPIAH)

Saldo kas awal, 1 Januari 2021	4.240,61
Kenaikan kas:	1.312,28
Aktivitas operasi	249,37
Aktivitas investasi	(937,09)
Aktivitas pendanaan	2.000,00
Saldo kas akhir tahun, 31 Desember 2021	5.552,89

Pengarah Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah
Penanggung Jawab Direktur Pengelolaan Aset Piutang
Redaktur Plh. Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan,
Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern
Penyunting/editor Joni Affandi, Wirawan Firman Nurcahya
Kontributor Konten Abdul Rahman, Adnan Agung Nugraha, Adhita Surya Permana, Ary Dekky Hananto,
Choirul Wicaksono, Djoko Koes Hery S, Faiz Rasyid Hendrawan, Joni Affandi, Lutfi Anwari, R. Adi Pengayoman,
Tonny Wahyu Poernomo, Wirawan Firman Nurcahya, Yulianto
Talent Adhita Surya Permana, Adnan Agung, Nugraha Arif Baladraf, R. Adi Pengayoman
Sekretariat Arif Baladraf, Meyka Dhian Prayogo, Rudianto, Taufiq Iskandar, Widya Anggraeni

Call Center 021 3924547 | **Pengaduan** pengaduan.pip@kemenkeu.go.id | **Email:** sekre.pip@kemenkeu.go.id
Instagram @pusatinvestasipemerintah | **Facebook** <https://www.facebook.com/kemenkeu.pip>
Youtube Pusat Investasi Pemerintah



Graha MR21 lantai 8
Jl.Menteng Raya No.21, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat. 10340.
Telp: 62-21 3924822

pip.kemenkeu.go.id